

**KERUNTUHAN MASYUMI DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP PERGERAKAN POLITIK GOLONGAN  
ISLAM**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**OLEH:**

**TUBAGUS ALI IBRAHIM**

**NIM. A92218130**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
TAHUH 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Ali Ibrahim  
NIM : A92218130  
Program Studi: Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas : Adab dan Humaniora  
Universitas : UTN Sunan Ampel

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Keruntuhan Masyumi Dan Dampaknya Terhadap Pergerakan Politik  
Golongan Islam**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat atau saduran dari skripsi lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 April 2023.

Yang membuat pernyataan



Tubagus Ali Ibrahim

NIM. A92218130

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KERUNTUHAN MASYUMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PERGERAKAN POLITIK GOLONGAN ISLAM**

oleh  
Tubagus Ali Ibrahim  
NIM. A92218130

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji di depan dewan penguji pada  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 20 Maret 2023

Pembimbing 1



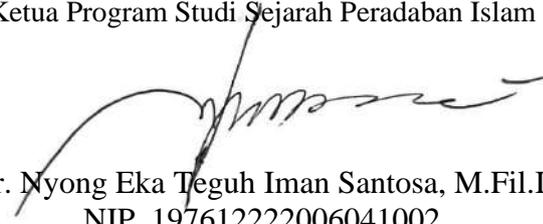
Prof. Dr. H. Imam Ghazali, MA  
NIP. 196002121990031002

Pembimbing 2



Juma, M. Hum  
NIP. 198801122020121009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam



Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I.  
NIP. 197612222006041002

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **KERUNTUHAN MASYUMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERGERAKAN POLITIK GOLONGAN ISLAM** yang disusun oleh Tubagus Ali Ibrahim (NIM.A92218130) telah dipertahankan di depan Dewan Penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 11 April 2023

Dewan Penguji:

Ketua Penguji



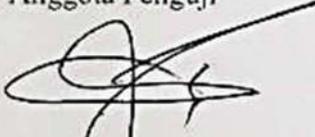
Prof. Dr. H. Imam Ghazali, MA  
NIP. 196002121990031002

Anggota Penguji



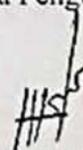
Juma, M.Hum  
NIP. 198801122020121009

Anggota Penguji



Dr. H. Achmad Zuhdi, DH, M.Fil.I  
NIP. 196110111991031001

Anggota Penguji



Dra. Lailatul Huda, M.Hum  
NIP. 196311132006042004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Sunan Ampel Surabaya



M. Mohammad Kurjum, M.Ag  
NIP. 196909251994031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tubagus Ali Ibrahim  
NIM : A92218130  
Fakultas/Jurusan : Adab Humaniora/Sejarah Peradaban Islam  
E-mail address : tubagusibrahim777@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Keruntuhan Masyumi Dan Dampaknya Terhadap Pergerakan Politik Golongan Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2023.

Penulis

( Tubagus Ali Ibrahim )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Ibrahim, Tubagus Ali. (2023) *Keruntuhan Masyumi Dan Dampaknya Terhadap Pergerakan Politik golongan Islam*. Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Imam Ghazali, MA. (II) Juma, M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:(1) Bagaimana sejarah perkembangan Masyumi? (2) Apa penyebab Masyumi bubar? (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca dibubarkannya partai Masyumi terhadap pergerakan politik golongan Islam yang sebelumnya tergabung dalam partai Masyumi?

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode sejarah (historis), yaitu suatu langkah merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengkritik, dan menafsirkan data dalam rangka menegakkan fakta serta kesimpulan yang kuat. Dalam teori penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralp Dahrendoft. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode library research.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pertama, Masyumi merupakan partai politik yang dijadikan wadah bagi berbagai macam golongan islam, menolak segala bentuk perundingan yang berpotensi merugikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Senantiasa memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. akan akan tetapi perjuangannya dalam konstituante menemui jalan buntu. Kedua, Masyumi makin terhimpit dengan Demokrasi terpimpin yang digagas Soekarno, ditambah PSII dan NU yang memisahkan diri, serta tuduhan atas keterlibatan PRRI hingga terbitnya keppres no.20 tahun 1960 yang mengultimatum Masyumi harus bubar. Ketiga, Jawaban Masyumi atas tuduhan keterlibatan dalam PRRI hingga pada akhirnya membubarkan diri dalam rangka menghindari label sebagai organisasi terlarang, . Perbandingan perolehan suara sebelum dan sesudah Masyumi bubar serta dampaknya terhadap golongan islam.

**Kata Kunci:** Partai Masyumi, Konstituante, Soekarno, Pemberontakan PRRI.

## ABSTRACT

Ibrahim, Tubagus Ali (2019). *The fall of the Masyumi and Its Impact on the Political Movement of Islamic Groups*. Department of Islamic History and Civilization, Faculty of Adab and Humanities, UIN Sunan Ampel Surabaya. Advisors: (I) Prof. Dr. H. Imam Ghazali, MA. (II) Juma, M.Hum.

This study aims to describe: (1) What is the history of Masyumi's development? (2) What causes Masyumi to disband? (3) What is the impact after the dissolution of the Masyumi party on the political movements of Islamic groups who were previously members of the Masyumi party?

To answer the problems, the researcher uses the historical (historical) method, which is a step to systematically and objectively reconstruct the past by collecting, criticizing, and interpreting data in order to establish facts and strong conclusions. In theory, this research uses conflict theory of Ralph Dahrendorf. Furthermore, the data was analyzed by library research method.

This thesis concludes that first, Masyumi is a political party that serves as a platform for various Islamic groups. Reject all forms of negotiations that have the potential to harm Indonesia as a sovereign country. Keep fighting for Islam as the basis of the state, however, his struggle in the constituent assembly met with a stalemate. Second, Masyumi was increasingly squeezed by the Guided Democracy initiated by Soekarno. Meanwhile the PSII and NU that broke away, as well as accusations of PRRI's involvement until the issuance of Presidential Decree No. 20 of 1960 which gave an ultimatum to the Masyumi to disband. Third, Masyumi's response to accusations of being involved in PRRI and finally dissolving itself in order to avoid being labeled as a banned organization. Comparison of vote acquisition before and after Masyumi disbanded and its impact on Islamic groups.

Keywords: Masyumi Party, Constituent, Soekarno, PRRI Rebellion.

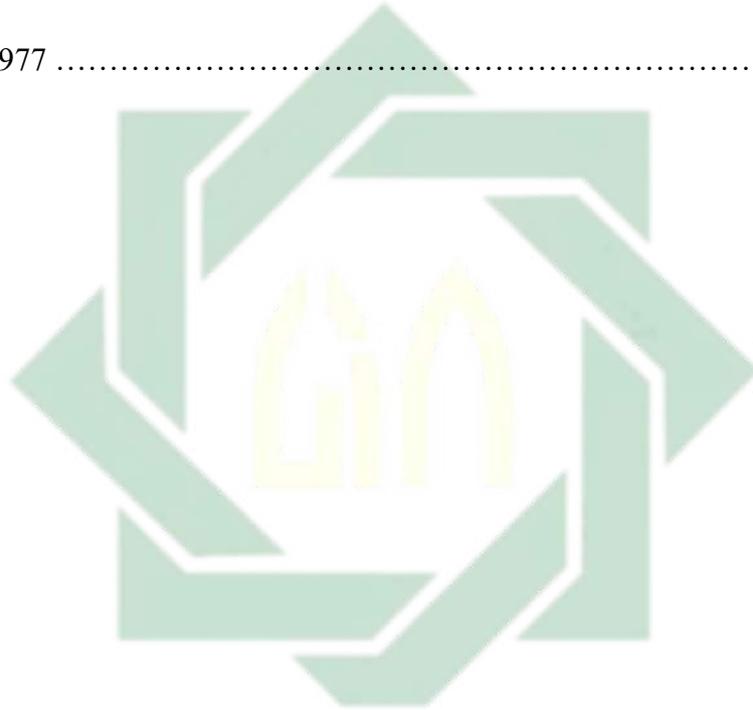
## DAFTAR ISI

KERUNTUHAN MASYUMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERGERAKAN POLITIK GOLONGAN ISLAM .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Pendekatan dan Kerangka Teori .....	6
1.6 Penelitian Terdahulu .....	8
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.8 Sistematika Bahasan.....	14
BAB II.....	16

SEJARAH DAN DINAMIKA PARTAI MASYUMI.....	16
2.1 Pembentukan Partai Masyumi.....	16
2.2 Sepak Terjang Partai Masyumi .....	20
2.3 Perjuangan Masyumi Dalam Konstituante.....	24
BAB III .....	32
LATAR BELAKANG BUBARNYA PARTAI MASYUMI .....	32
3.1 Masyumi Pada Saat Demokrasi Terpimpin.....	32
3.2 Keluarnya NU Dan PSII dari Masyumi .....	38
3.3 Tuduhan Keterlibatan PRRI Dan Pembubaran Masyum .....	43
BAB IV .....	49
DAMPAK YANG MUNCUL PASCA BUBARNYA PARTAI MASYUMI .....	49
4.1 Upaya Menghindari Label Partai Terlarang.....	49
4.2 Perbandingan Perolehan Suara Partai Islam Pada Pemilu Sebelum Dan Sesudah Masyumi Bubar.....	55
4.3 Dinamika Partai Islam Pasca Bubarnya Masyumi .....	66
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Kritik dan Saran .....	72
Daftar Pustaka .....	74
Lampiran-Lampiran .....	79

## DAFTAR TABEL

Pemilu Legislatif 1955.....	57
Pemilu Dewan Konstituante 1995.....	58
Pemilu 1971 .....	60
Pemilu 1977 .....	61



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	78
Lampiran 2 .....	79
Lampiran 3 .....	84
Lampiran 4 .....	85
Lampiran 5 .....	86
Lampiran 6 .....	89
Lampiran 7 .....	92
Lampiran 8 .....	96
Lampiran 9 .....	97
Lampiran 10 .....	98
Lampiran 11 .....	101
Lampiran 12 .....	104
Lampiran 13 .....	106
Lampiran 14 .....	108

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan munculnya maklumat pemerintah No. X 3 november 1945 yang dicetuskan oleh wakil presiden Moh. Hatta. Perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan pada desakan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) untuk segera mendirikan berbagai macam partai politik dalam persiapan menyambut Pemilu anggota badan-badan perwakilan rakyat yang akan digelar pada bulan januari tahun 1946.<sup>1</sup>

Kebijakan tersebut itu segera disambut meriah serta semangat oleh segenap lapisan masyarakat. Sekitar November hingga desember tahun 1945, bermacam-macam partai politik mulai muncul kepermukaan. Meskipun secara tidak langsung karena ajakan pemerintah, kemudian diadakan konferensi umat islam Indonesia pada tanggal 7-8 november 1945 di Yogyakarta.<sup>2</sup>

Pembentukan Masyumi Sebagai Partai Politik didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat serta ormas Islam mulai dari Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), hingga beberapa ormas Islam lainnya yang tergabung ke dalam Masyumi, mulai dari Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), juga Organisasi Islam lokal seperti, Nahdatul Wathan di Lombok dan Al-Wasliyah di Medan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nazaruddin Syamsudin, *Soekarno, Pemikiran Dan Kenyataan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),7.

<sup>2</sup> Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 82-83.

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987), 49-50.

Masyumi di percaya sebagai satu- satunya wadah perjuangan politik Organisasi- organisasi ini.

Salah satu hasil dari kongres tersebut adalah diputuskannya berdiri partai politik Islam Masyumi. Dengan dibentuknya Masyumi pada bulan November tahun 1945 menjadi satu-satunya wadah politik yang mewakili umat Islam, sehingga golongan islam berhasil memperoleh jumlah simpatisan yang masif.

Herbert Feith berpendapat bahwa di dalam pemilu tingkat regional yang digelar di beberapa wilayah di pulau Jawa pada tahun 1946 serta pemilihan umum yang diamati secara seksama di daerah tertentu seperti Yogyakarta di tahun 1951, Partai Masyumi mendapatkan perolehan suara yang tinggi dan jika dibandingkan yang lain lebih banyak meraup suara. Sehingga Masyumi diharapkan mampu tampil sebagai partai yang besar dalam pemilihan umum di pentas nasional.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu di cermati sehubungan dengan islam dan politik di Indonesia pasca pemilu 1955, *Pertama*, Masyumi merupakan salah satu partai yang mendapatkan kursi di seluruh wilayah pemilihan, *kedua*, lebih dari sepuluh wilayah pemilihan, Partai Masyumi tampil mendominasi di beberapa provinsi (Jawa Barat, Sumatera Tengah dan lain-lain). *ketiga*, tanpa disangka-sangka, NU mendominasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti juga tanpa diduga PSI justru menyusut di kancah perpolitikan Nasional.

---

<sup>4</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998). 92-93.

*Keempat*, PKI dan PNI, tanpa disangka keduanya menguat di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.<sup>5</sup>

Rentang 1945 hingga 1949 seluruh potensi sosial yang ada Indonesia diabdikan untuk mengawal kemerdekaan Indonesia. Setelah Belanda membawa sekutu untuk kembali menduduki Indonesia. Peran Masyumi pada masa ini bisa dikatakan total. Masyumi menolak seluruh perundingan dengan Belanda, karena dianggap dapat menodai perjuangan yang selama ini telah digelorakan.

Salah satu tokoh Masyumi yaitu Dr. Soekiman Wirjosandjoyo berpendapat: “tidak dapat disangkal lagi bahwa Masyumi adalah salah satu kekuatan yang telah berupaya memperjuangkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, tidak bisa diperlemah oleh pemegang tampuk kepemimpinan, menuju penyimpangan, dengan jiwa patriot bangsa yang secara tegas menolak perjanjian Linggarjati dan Renville, dipelopori oleh mereka yang sekarang ini dan menyebut dirinya sebagai Golongan Revolusioner Progresif.

Selama Masyumi berpusat di Yogyakarta. Indonesia memulai fase yang baru, yakni “Tumpah Darah Indonesia” yang didasari UUD 1945. Perlu disadari bahwa perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville merupakan hasil yang diupayakan oleh partai-partai politik berhaluan kiri seperti Partai Sosialis, PNI dan PKI serta Partai Buruh, Masyumi dengan tegas menolak kedua perjanjian

---

<sup>5</sup> Taufik Abdulah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), 33.

itu, serta memilih untuk menentang keras terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Komunis di Madiun September 1948.<sup>6</sup>

Berbagai persoalan intern dan ekstern menjadikan Masyumi kian hari kian lemah, perbedaan yang terjadi di kalangan internal seringkali berakhir dengan konflik, puncak konflik itu ditandai oleh keluarnya Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1947, yang disusul oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1952. Sementara persoalan eksternal berhubungan dengan situasi politik di masa itu, yaitu sistem demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.

Pada sistem demokrasi parlementer berlaku azas liberal dengan multi partai. Dengan azas ini memudahkan partai-partai politik didirikan, dalam hubungannya dengan Masyumi, organisasi- organisasi islam anggota partai Masyumi akan mudah memisahkan diri dan membentuk partai politik lain yang independent yang mengakibatkan makin lemahnya kondisi internal partai Masyumi.<sup>7</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tertera berikut ini:

1. Bagaimana sejarah perkembangan partai Masyumi?

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 159-160.

<sup>7</sup> Silverio R.L. Aji Sampurno S, *Latar Belakang Keluarnya Keppres no. 200 Tahun 1960: Sekitar Pembubaran Partai Masyumi* (Yogyakarta: Sejarah Fakultas Sastra. Universitas Sanata Dharma, 1994), 37.

2. Apa penyebab partai Masyumi bubar?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca dibubarkannya partai Masyumi terhadap pergerakan politik golongan islam yang sebelumnya tergabung dalam partai Masyumi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari susunan rumusan masalah diatas nantinya penulis akan memberikan tujuan dari penulisan ini, yakni:

1. Untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan partai Masyumi
2. Untuk mengetahui Penyebab runtuhnya partai Masyumi
3. Untuk mengetahui Dampak yang ditimbulkan setelah partai Masyumi resmi bubar terhadap golongan islam yang sebelumnya tergabung dalam internal partai Masyumi.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Selain itu penelitian ini juga memiliki pelbagai manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa kalangan yang ada di masyarakat. Diantara kegunaan manfaat itu adalah:

1. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini nantinya penulis berharap dapat menambah rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai objek penelitian dengan objek partai Masyumi serta Dampaknya terhadap pergerakan politik islam yang ada di Indonesia. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya di kemudian hari.

## 2. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini nantinya harapan penulis dapat menambah referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai objek penelitian Partai Masyumi serta dinamika dalam memperjuangkan nilai islam lewat politik, sehingga penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat kepada para peneliti selanjutnya di kemudian hari.

## 3. Secara Umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan luas mengenai keilmuan sejarah yang dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi di kemudian hari. Selain itu penelitian ini juga kan dapat melestarikan sejarah pemikiran politik islam khususnya yang terjadi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh partai Masyumi.

### **1.5 Pendekatan dan Kerangka Teori**

Dalam melakukan penelitian diperlukan hal yang sangat penting dengan membuat suatu pendekatan dan kerangka teori sebagai referensi, sebagai perangkat untuk menganalisis suatu kajian. Sehingga dari segi mana penelitian ini hendak dilakukan, deskripsi dan rekonstruksi yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh jenis pendekatan yang digunakan.

Landasan berfikir yang peneliti gunakan ialah teori konflik oleh Ralp Dahrendoft, Sosiolog yang dilahirkan pada tanggal 01 Mei tanggal 1929 di kota Hamburg, Jerman. beliau menyebutkan bahwa sekumpulan individu atau

Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan ditandai dengan munculnya pertentangan yang terus menerus di segala aspek nya.

Tidak hanya itu, setiap bagian yang ada menghasilkan disintegrasi sosial yang nyata. Teori ini berpandangan bahwa situasi teratur yang tercipta di masyarakat disebabkan karena hadirnya pemaksaan dan tekanan yang diberikan oleh golongan yang sedang berkuasa.<sup>8</sup>

Teori ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada partai Masyumi, karena menjelang runtuhnya partai Masyumi, kondisi partai Masyumi mulai lemah karna mengalami pertikaian internal hingga hengkang nya PSI dan NU. Faktor eksternal pun ikut menyumbang dampak yang signifikan terhadap keruntuhan Masyumi, mulai dari tuduhan atas keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI yang pada akhirnya membuat Presiden mengeluarkan Keppres no.200 tahun 1960.

Untuk membantu melakukan analisis sejarah sosial dan politik peristiwa runtuhnya Masyumi dan dampaknya terhadap pergerakan politik golongan islam. Peneliti menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan ini berfungsi untuk menjelaskan kejadian di masa lalu dengan runut.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan pendekatan politik, yaitu sebagai perangkat untuk untuk menganalisis dinamika kekuasaan terkait dengan mekanisme runtuhnya suatu organisasi atau dinasti.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur: Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 30-31.

<sup>9</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), 88.

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 546.

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Yang berkaitan dengan Bubar nya Masyumi telah ada beberapa yang dilakukan sebelumnya, tetapi yang fokus membahas pada dampak yang ditimbulkan setelah dibubarkannya Masyumi terhadap golongan islam belum ada. Yang hampir sama adalah pembahasan tentang pertumbuhan serta perkembangan Partai Masyumi, yaitu lebih berfokus kepada awal mula kemunculan Masyumi, tokoh- tokoh utama, serta perjalanan partai Masyumi dalam meneguhkan posisinya sebagai partai yang menaungi berbagai golongan Islam hingga puncak pencapaian partai Masyumi itu sendiri.

Dengan hadirnya penelitian ini juga menjadi sebuah objek informasi mengenai Runtuhnya Masyumi dan Dampaknya terhadap pergerakan politik golongan islam Karena belum ada yang membahas tentang secara rinci sehingga besar harapan penulis nantinya penelitian ini bisa menjadi rujukan yang baru.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah:

1. “Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960) yang ditulis oleh Insan Fahmi Siregar, FIB UI, 2003.<sup>11</sup> perbedaan skripsi ini dibanding dengan penelitian saya ialah, penelitian ini hanya terfokus mulai dari pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sejauh apa Partai Masyumi berkembang serta Pertikaian antara Partai Masyumi Dengan Presiden Soekarno yang mengakibatkan diterbitkannya Keppres no.20 tahun 1960 yang

---

<sup>11</sup> Insan fahmi Siregar, “sejarah pertumbuhan dan perkembangan partai Masyumi (1945-1960)”, (Depok : Universitas Indonesia, 2013, 63–65. (Surahman 2002) (Syaeckhu 2021) (Suharsimi 1996)

memaksa Partai Masyumi untuk Bubar, sementara penelitian saya akan lebih berfokus pada aspek pembubaran Partai Politik Masyumi dan Dampaknya terhadap golongan islam.

2. “Pancasila vs Islam: konflik tentang dasar negara antara PKI- Masyumi Di Majelis Konstituante 1956 - 1959. Disertasi yang ditulis oleh Nanang Surahman<sup>12</sup> berfokus terhadap konflik yang dihadapi partai Masyumi terhadap PKI berkaitan dengan Dasar negara Yang Ideal, Pertikaian ini pun menjadi salah satu alasan Yang menjadikan Posisi Partai Masyumi kian hari Kian Melemah, akan tetapi penelitian saya lebih fokus terhadap berbagai alasan kenapa akhirnya Masyumi harus dibubarkan.
3. “Prawoto Mangkusasmito Dan Detik- Detik Pembubaran Masyumi” yang ditulis oleh Ahmad Syaekhu, 2021.<sup>13</sup> disertasi yang ditulis oleh Ahmad Syaekhu fokus terhadap peran Ketua Masyumi Terakhir yaitu Prawoto Mangkusasmito Dalam menghadapi situasi Darurat mulai dari tuduhan Yang mengatakan bahwa Partai Masyumi terlibat dalam PRRI hingga yang mengakibatkan keluarnya Keppres no. 20 tahun 1960, dalam skripsi ini perbedaannya ialah saya mengurai lebih lanjut dampak apa yang akan dirasakan oleh golongan islam yang tergabung di Masyumi setelah resmi dibubarkannya.

---

<sup>12</sup> Nanang Surahman, “Pancasila VS Islam : Konflik Tentang Dasar Negara Antara PKI- Masyumi di Majelis Konstituante 1956 - 1959” ( Depok : Universitas Indonesia), 20.

<sup>13</sup> Ahmad Syaekhu, “*Prawoto Mangkusasmito dan Bubarnya Partai Politik Masyumi*”, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 22.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu “Book Research” atau Studi literatur Kepustakaan. yang mana menentukan langkah penelitian terhadap beberapa literatur atau buku yang berhubungan dengan judul penelitian. pendekatan ini digunakan karena masalahnya berkaitan dengan masalah teoritik,

Dikarenakan tuntutan observasi datanya berorientasi pada interpretasi buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan sebagainya guna memperoleh data yang terbukti valid. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi teks (library research) yaitu sebuah prosedur atau tata cara penelitian guna memperoleh data deskriptif berupa kumpulan fakta tertulis atau lisan dari orang-orang yang mengalami.<sup>14</sup>

### 1. Heuristik

Heuristik ialah menemukan atau mengumpulkan sumber. Berkaitan dengan sejarah masalah yang dimaksud dengan sumber yakni sumber sejarah berupa kesaksian, catatan, dan kumpulan fakta yang menghasilkan gambaran mengenai sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sebagai sumber sejarah. Pada tahapan ini penulis berupaya mencari data terkait dengan partai Masyumi sebanyak-banyaknya, seperti data yang ada di perpustakaan atau tempat lain berupa esai, buku, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

---

<sup>14</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 114.

Pada tahap heuristik, penulis sudah berusaha menggali dan menghimpun berbagai sumber sejarah, mulai dari sumber primer maupun sumber sekunder. Diantara sumber primer yang penulis peroleh adalah arsip- arsip dan dokumen Masyumi yang tersimpan dalam perpustakaan DDII yang berada di Jl. Kramat raya no.45, Jakarta. Sementara itu, dalam pencarian sumber sekunder, penulis sudah berusaha mencari referensi atau buku yang membahas tentang Masyumi, Soekarno, dan Demokrasi Terpimpin, Sidang Konstituante.

a) Sumber Primer

Dalam penelitian sejarah, sumber primer adalah sumber yang paling utama dicari, karena sumber primer sangat berpengaruh terhadap kepenulisan sejarah untuk sekarang hingga masa yang akan datang.

Sumber Primer merupakan sumber yang dihasilkan atau didapat oleh beberapa tokoh yang secara langsung ikut serta atau bisa disebut sebagai saksi mata dalam sebuah peristiwa bersejarah.<sup>15</sup>

Sumber primer juga menjadi sumber pokok atau sumber utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan sumber primer dengan melakukan Library research atau yang biasa disebut sebagai telaah dokumen,<sup>16</sup> di Perpustakaan Dewan Da'wah yang menyimpan koleksi khusus tentang partai Masyumi seperti, catatan pidato para pemimpin Masyumi dalam sidang Konstituante

---

<sup>15</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta : Ombak, 2011), 56.

<sup>16</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta : Ombak, 2011), 106.

serta surat kabar Abadi, selain itu penulis juga mencari referensi lain yaitu:

- 1) Keppres No.200 tahun 1960.
- 2) AD/ART Masyumi
- 3) Tanggapan resmi Masyumi terhadap Keppres no.200 tahun 1960
- 4) Risalah Konstituante
- 5) Surat keputusan Membubarkan diri Masyumi.
- 6) Natsir, Capita Selecta djilid III, Jakarta: Koleksi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- 7) Natsir, Mohammad. Islam sebagai Dasar Negara. Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 2014.

**b) Sumber Sekunder**

Sumber Sekunder atau biasa disebut sumber pendukung adalah sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari sumber primer yang telah diperoleh dalam penelitian ini, sumber sekunder nya antara lain:

- 1) Remy Madinier, Desmond Partai *Masyumi Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*. Jakarta, Mizan, 2013.<sup>17</sup>
- 2) Silverio R.L Aji Sampurno. Latar belakang Keluarnya Keppres No.200 tahun 1960: sekitaran Pembubaran Partai Masyumi,

---

<sup>17</sup> Rémy Madinier, *Partai Masyumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*, (Jakarta: Mizan, 2013, 484.

Yogyakarta, Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 1994.<sup>18</sup>

3) Insan Fahmi Siregar, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945- 1960) FIB UI, 2003.<sup>19</sup>

## 2. Verifikasi

Tahapan kedua yaitu untuk mencari kebenaran dari sumber – sumber sejarah yang telah diperoleh melalui verifikasi atau kritik sumber yang telah didapat untuk mengetahui apakah sumber tersebut terpercaya atau tidak.

Sejarawan harus mengupayakan segala kemampuan dan kecerdasannya, bahkan dituntut harus mampu menggabungkan keraguan, pengetahuan, percaya begitu saja serta rasionalitas. Fungsi dari verifikasi atau yang biasa disebut dengan kritik sumber agar karya tervalidasi merupakan hasil dari suatu proses ilmiah yang kelak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, bukan hasil dari manipulasi apalagi fantasi semata.<sup>20</sup>

## 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penetapan pengertian yang saling berhubungan lewat kumpulan fakta yang diperoleh dengan percampuran dan kombinasi data guna mendapatkan hasil secara keseluruhan. Dalam prosesnya, semua sumber yang dimiliki dikumpulkan satu sama lain, berdasarkan keterkaitan dengan

---

<sup>18</sup> (Silverio R.L. Aji Sampurno S 1994) Yogyakarta: Sejarah Fakultas Sastra. Universitas Sanata Dharma, 1994. 37

<sup>19</sup> Insan Fahmi Siregar, “*Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)*”, (Depok : Universitas Indonesia, 2013), 63–65.

<sup>20</sup> Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 132.

Runtuhnya Masyumi Dan Dampaknya Terhadap Pergerakan Politik Golongan Islam.

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode sejarah, yakni tentang kepenulisan, penjelasan, atau pelaporan tentang hasil penelitian sejarah yang sudah dilakukan. Seperti penelitian ilmiah, penulisan dari hasil penelitian sejarah harapannya dapat memberikan gambaran yang jelas dalam proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan).<sup>21</sup>

### 1.8 Sistematika Bahasan

**Bab pertama** dalam penulisan skripsi membahas mengenai pendahuluan, khususnya tentang asal mula masalah, rumusan, tujuan dan keunggulan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistem pembahasan. Hal ini penulis lakukan agar penelitian ini tetap dalam koridor yang tepat dan tidak melebar kepada pembahasan diluar topik yang telah penulis tentukan

**Bab kedua**, mengkaji tentang latar belakang dan perkembangan partai Masyumi, serta perdebatan tentang dasar negara pada sidang konstituante di tahun 1955, perbedaan pandangan antara Natsir dan Soekarno. Penulis memulai pembahasan bab kedua dengan berdirinya partai Masyumi serta dinamikanya dalam konstelasi politik Indonesia.

---

<sup>21</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 64.

**Bab ketiga**, penyebab keruntuhan Masyumi, mulai dari perselisihan internal Masyumi, Hengkangnya PSI dan NU, tuduhan atas keterlibatan tokoh Masyumi dalam pemberontakan pemerintah Revolusi Indonesia serta Keppres No.200 Tahun 1960 yang berisikan ultimatum pembubaran Masyumi. Pada bab ketiga, penulis berusaha untuk membeberkan faktor- faktor apa saja yang membuat partai Masyumi lemah hingga akhirnya bubar.

**Bab keempat**, respon Masyumi dalam menanggapi tuduhan terlibat pemberontakan, serta kondisi golongan Islam pasca pembubaran mandiri yang dilakukan oleh Masyumi. Penulis mencoba menjelaskan tentang langkah yang ditempuh partai Masyumi dalam menghadapi keretakan internal, gangguan eksternal serta tuduhan keterlibatan dalam PRRI.

**Bab kelima**, Bagian ini akan berbicara tentang akhir percakapan dari awal hingga akhir, kemudian diakhiri dengan ide, koneksi, dan indeks buku. Penulis pada akhirnya akan menjabarkan hasil dari semua susunan bab diatas sehingga sampailah kepada sebuah kesimpulan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### SEJARAH DAN DINAMIKA PARTAI MASYUMI

#### 2.1 Pembentukan Partai Masyumi

Pada Mulanya, Masyumi merupakan lembaga yang digunakan Jepang untuk menghimpun simpati umat Islam. Masyumi menjadi wadah untuk menghimpun organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan beberapa organisasi masyarakat islam lain. Masyumi didirikan pada tanggal 24 oktober 1937 sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A'ala Indonesia), Setelah Jepang menyerah pada sekutu, terjadilah kekosongan kekuasaan yang pada akhirnya menuntun kepada kemerdekaan Indonesia.<sup>22</sup>

Pada tanggal 15 agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. tidak disangka justru memberikan dampak yang signifikan bagi perjuangan serta semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Kesempatan ini pun menjadi titik balik bagi para tokoh pergerakan yang ada di indonesia untuk melepaskan diri dari seluruh belenggu penjajahan negara lain.<sup>23</sup> Pemerintah mengeluarkan arahan pada tanggal 4 november 1945 yang berisikan dorongan untuk mendirikan partai- partai politik yang resmi serta mudah dikenali oleh masyarakat.

Maklumat pemerintah itu disambut hangat oleh segenap lapisan masyarakat. Sekitar bulan november hingga desember 1945. Sejak saat itu,

---

<sup>22</sup>George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Solo, UNS Press, 1995). 157.

<sup>23</sup> Silverio R.I, Aji Sampurno, *Latar Belakang Keluarnya Keppres Nomor 200 Tahun 1960 Sekitar Pembubaran Masyumi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 1995, 12.

mulai bermunculan partai-partai politik yang mana merupakan kelanjutan dari organisasi yang sebelumnya sudah aktif bergerak di masa penjajahan belanda dan pendudukan jepang, seperti PKI, PNI, PSI, lalu Masyumi. Lahir berdasarkan Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta pada tanggal pada tanggal 7 november 1945, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam yang turut serta membidani berdirinya partai Masyumi.<sup>24</sup>

Masyumi terbentuk lewat inisiatif para tokoh gerakan sosial keagamaan serta tokoh partai politik yang sudah eksis sejak zaman pra kemerdekaan, seperti Agus Salim, Muhammad Natsir, Abdul Wahid Hasim, Prof. Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Roem serta banyak lagi tokoh yang ikut aktif terlibat. Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan kepengurusan Masyumi sendiri, yang terdiri dari wakil- wakil partai dan sosial keagamaan yang berbeda.<sup>25</sup>

Agus Salim adalah mantan tokoh partai modernis Sarikat Islam. Prof Muzakir adalah tokoh pergerakan Muhammadiyah yang bercorak modernis. Wahid Hasjim adalah merupakan tokoh organisasi masyarakat tradisional Nahdatul Ulama atau yang biasa disebut NU.

Mohammad Natsir dan Moh. Roem merupakan tokoh- tokoh muda yang pernah menjadi pemimpin gerakan pemuda beraliran modernis JIB (Jong Islamited Bond). Tokoh-tokoh selain Wahid Hasyim adalah tokoh islam yang beraliran modernis. Mereka berperan sebagai tokoh yang mengawali inisiatif

---

<sup>24</sup>Pramono. U. Thantowi, Jurnal Pemikiran Agama dan Peradaban/TANWIR, *Perjalanan Politik Muhammadiyah dari hmad Dahlan hingga Syafi' I Ma'arif*, edisi perdana, Vol. 1, Mei 2003.

<sup>25</sup> Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis*, (Jogjakarta, P.T. Safira Insani Press, 2004), 9-10.

membentuk partai. Merumuskan rancangan organisasi serta menentukan bagaimana cara pembentukan partai itu sendiri. Yang mana akan berpengaruh pada aliran partai yang akan dibentuk.<sup>26</sup>

Awalnya, yang tergabung dalam Masyumi hanyalah empat organisasi, yakni: NU, Muhammadiyah, Persarikatan Umat Islam dan Persis, namun seiring berjalannya waktu, hampir seluruh Ormas Islam kecuali Perti, baik dalam ranah regional maupun nasional, masuk dan menjadi anggota Masyumi. Hanya dalam kurun waktu satu tahun sejak berdiri, Masyumi mampu mendekati PNI dan menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada saat itu.<sup>27</sup>

Terdapat dua organisasi yang berasal dari Sumatera, yakni al-Jam'iyah al-Washliyyah dan al-Ittihadiyah menjadi anggota Masyumi dikemudian hari, setelah pulihnya hubungan antara Sumatera Utara dan Yogyakarta secara politis. Sejak tahun 1949, rakyat di daerah- daerah yang dikuasai oleh republik Indonesia, khususnya Yogyakarta.

Terutama setelah keberhasilan pada KMB. Mulai banyak Ormas Islam di wilayah pendudukan yang melebur dengan Masyumi serta memproklamkan diri sebagai cabang dari Masyumi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'ati al-Islami (Pakistan)*, (Jakarta, Paramadina, 1999), 62- 64.

<sup>27</sup> Thaba Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1986), 159.

<sup>28</sup> Delliar Noer, *Partai Politik di Pentas Nasional*, (Jakarta, Grafiti Press, 1987), 49-50.

Dengan diselenggarakannya kongres di Yogyakarta<sup>29</sup>, keputusan membentuk Masyumi tidak lagi dianggap hanya sebagai keputusan dari sejumlah tokoh, akan tetapi resolusi dari “segenap umat Islam di Indonesia” melalui perwakilan mereka. Sesuai dengan ijma’ mayoritas kaum modernis.

Jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah nampak realita aspirasi politik umat Islam tidak hanya bercorak satu, tetapi justru sangat beragam akan tetapi tidak terakomodasi baik dalam satu wadah yang tepat, yakni partai politik. Begitupun setelah kemerdekaan, keadaan ini tetap berjalan sesuai dengan indikator yang jelas. Terdapat beberapa golongan pendukung Masyumi yang selanjutnya justru menyatakan berpisah dari partai Masyumi.<sup>30</sup>

Menurut beberapa tokoh penggagas terbentuknya Masyumi, terdapat beberapa pertimbangan yang memotivasi mereka untuk mendirikan partai yang mampu menjadi “partai Islam tunggal” di Indonesia. Tokoh- tokoh ini mengacu pada surat dalam ayat al-Quran yaitu surat Ali Imran ayat 103, yang menyerukan agar umat Islam tidak terpecah- belah dan senantiasa bersatu. Perbedaan pendapat yang ada diantara sesama kelompok Islam menurut mereka merupakan anugerah, karena perbedaan yang timbul pun bukanlah yang bersifat

---

<sup>29</sup> Kongres Umat Islam yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945 merupakan jawaban dari maklumat pemerintah yang mendorong agar munculnya partai-partai yang mudah dikenali oleh masyarakat, sehingga berhimpunlah berbagai golongan Islam yang ada di Indonesia pada kongres tersebut untuk membentuk wadah politik guna memperjuangkan Islam dalam kancah politik Nasional.

<sup>30</sup> Ismail Faisal, *Pijar- Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta, LESFI (Lembaga Studi Filsafat Islam, 2002), 119.

mendasar, tetapi hanyalah berkaitan dengan hal yang memang masih bisa diperdebatkan (perkara- perkara kecil).<sup>31</sup>

## 2.2 Sepak Terjang Partai Masyumi

Pada masa kabinet Sjahrir masih bertugas, Soekarno selaku Presiden ternyata juga belum menyadari corak kepemimpinan dalam negeri. Mereka belum menyadari politisi yang berasal dari kalangan Muslim. Padahal jika ditelisik lebih dalam, umat islam yang bergerak di tingkat bawah hingga atas pada masa penjajahan Jepang cukup banyak, walaupun belum terkoordinasi dengan baik. Dikarenakan jumlah umat islam yang mayoritas di masa revolusi, justru seakan- akan tidak diperhitungkan.<sup>32</sup>

Sejak kabinet maupun KNIP<sup>33</sup>, kedudukan umat Islam yang mayoritas justru sama sekali tidak tercermin. Pada kabinet yang pertama, dari 18 menteri yang ada, hanya terdapat dua menteri yang dapat disebut mewakili kalangan muslim. Di Komite Nasional Indonesia Pusat pun, dari 136 anggotanya, hanya 20 yang mewakili politisi Muslim, sementara pada BP- KNIP, dari 15 anggota, hanya dua orang yang mewakili politisi Muslim yakni, Mr. Sjafruddin Prawingara dan A. Wachid Hasjim.

Setelah perombakan yang terjadi dalam keanggotaan BP-KNIP pada bulan November 1945, dari 17 anggotanya hanya tiga yang mewakili kalangan

---

<sup>31</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik isl* (H. Anwar 1995)am, 119.

<sup>32</sup> Harjono Anwar, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman- Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 84.

<sup>33</sup> KNIP bertugas untuk membantu Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk.

muslim, yakni: Mr. Yusuf Wibisono, Mr. Sjafruddin Prawinegara, serta M. Natsir. Pada bulan selanjutnya keanggotaan BP-KNIP ditambah hingga 26 orang, politisi muslim yang sebelumnya hanya terwakili 4 suara, yakni tiga nama yang sebelumnya sudah disebutkan ditambah dengan Mohammad Zein Djambek.<sup>34</sup>

Partai Masyumi seringkali berlawanan dengan Pemerintah. Masyumi tidak menyetujui jalan yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi Belanda. Sehingga menjadikan Masyumi mengambil peran sebagai oposisi, sikap oposisi ini dapat dilihat sepanjang kabinet Sjahrir dan Amir Syarifuddin. Masyumi tidak percaya kepada kabinet Sjahrir karena lebih mengutamakan perundingan disaat berhadapan dengan Belanda.

Walaupun Masyumi menolak untuk berpartisipasi dalam Kabinet Sjahrir I, akan tetapi tetap saja terdapat kader- kader Masyumi di dalam Kabinet, seperti M.Natsir selaku Menteri Penerangan, Arudji Kartawinata selaku menteri Muda Pertahanan, serta Mr. Syafruddin Prawinegara selaku Menteri Muda Keuangan dan M. Rasyidi selaku Menteri Agama. Sebagaimana Kabinet Sjahrir II, dimana terdapat juga kader Masyumi, yakni Mr. Mohammad Roem sabagai menteri dalam negeri. Harsono Tjokroaminoto selaku Menteri Muda Pertahanan. M.Natsir selaku Menteri Penerangan, Mr. Syafruddin Prawinegara selaku Menteri Keuangan, Yusuf Wibisono selaku Menteri Muda Kemakmuran, K.H. Wahid Hasyim selaku Menteri Negara.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 161-169.

<sup>35</sup> Terdapat semacam disintegrasi di dalam tubuh Masyumi, dimana koordinasi antar kader dengan partai terlihat tidak sejalan.

Walaupun ada kader Masyumi yang masuk kedalam kabinet, partai Masyumi tetap bersikap sebagai oposisi terhadap kabinet Sjahrir III. Bahkan tidak hanya sampai disitu, sikap oposisi menjadi keras, setelah adanya kesepakatan LinggarJati, kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh Sutan Sjahrir sebagai perwakilan Indonesia dan Schermerhorn dari perwakilan Belanda. Persetujuan ini tidak hanya ditentang oleh rakyat belanda, akan tetapi juga ditolak oleh sebagian kelompok masyarakat Indonesia.<sup>36</sup>

Tentang isi dari perjanjian Linggarjati itu antara lain bahwa Belanda akan mengakui kekuasaan Republik secara de facto atas Sumatera dan Jawa, akan dibentuk suatu masa pemerintahan transisi, serta dibentuk suatu uni Indonesia-Belanda.<sup>37</sup> Setelah terjadinya agresi belanda I pada tanggal 21 juli 1947,<sup>38</sup> kembali di gelar perundingan yang diselenggarakan diatas kapal perang milik Amerika Serikat yang dinamai Renville, hingga hasil perjanjian ini disebut sebagai perjanjian Renville.

. Perjanjian ini diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 1947 - 17 Januari 1948. Masyumi memandang bahwa Amir Syarifuddin terlalu banyak mengalah dalam perundingan ini. Ketika perjanjian ini disetujui oleh kebanyakan anggota kabinet, Masyumi memilih menarik diri dari kabinet Amir.

---

<sup>36</sup> Penolakan di negeri Belanda didasarkan anggapan bahwa persetujuan LinggarJati terlalu banyak kekuasaan yang diberikan kepada RI, lihat R.z Leirissa, "Jalur Linggarjati" dalam A.B Lopian dan P.J. Drooglever (Peny.), *Menelusuri Jalur Linggarjati*, (Jakarta: Grafiti, 1992), 4.

<sup>37</sup> *Ibid*, 4.

<sup>38</sup> Operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di pulau Jawa dan Sumatera pada 21 juli- 5 agustus 1947.

Tidak berlebihan jika menyebut bahwa rakyat sangat kecewa dengan hasil dari perjanjian Renville.<sup>39</sup>

Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia menyebabkan wilayah Indonesia tinggal sebagian pulau Jawa dan Sumatera saja. Amir juga menyetujui agar Indonesia segera menarik mundur semua pasukan dan tentara gerilya dari “Garis Van Mook”. Garis ini merupakan garis pembatas yang memisahkan kawasan Indonesia dengan kawasan Belanda pada masa revolusi, yang ditetapkan secara sepihak oleh Letjen Van Mook yang merupakan Gubernur Jendral Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia (Jakarta).

Setelah pertempuran yang terjadi pada juli 1947 itu, Belanda mengakui secara sepihak bahwa Jawa Barat “telah jatuh” ke tangan mereka. Masyumi berpandangan bahwa perjanjian Renville justru membawa mudharat (kerusakan), terhadap negara dan bangsa Indonesia. Pimpinan partai pun memberikan fatwa bahwa “wajib hukumnya menolak perjanjian itu”. Hal ini selaras dengan sikap partai Masyumi yang sejak awal menentang perjanjian Renville.<sup>40</sup>

Peristiwa yang tidak kalah pentingnya ialah peran Moh. Roem yakni perundingan Republik Indonesia dengan Belanda yang dikenal sebagai perundingan “Roem- Royen”. Roem menjadi ketua perwakilan bagi Indonesia,

---

<sup>39</sup> Harjono Anwar, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman- Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 92.

<sup>40</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan partai Jama'ati al-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina), 139-140.

sementara Belanda diwakili oleh Van Royen. Hasil dari perundingan ini, Konferensi Meja Bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag berhasil digelar. Pimpinan delegasi Indonesia diwakili oleh Hatta dan M. Roem, pemberian kedaulatan ini disepakati pada tanggal 29 Desember 1949, dengan ini menandai berakhirnya zaman revolusi.<sup>41</sup>

### 2.3 Perjuangan Masyumi Dalam Konstituante

Dalam usahanya membela draf UUD didepan BPUPKI di tahun 1945, Soekarno berpendapat:

“UUD yang dibuat sekarang ini merupakan Undang-undang sementara. jikalau boleh saya menyebutnya: Undang-undang dasar kilat. jika kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenang dan nyaman, tentu kita akan kembali menghimpun Majelis Perwakilan Rakyat yang berfungsi untuk membuat undang-undang dasar yang lebih menyeluruh dan sempurna.<sup>42</sup>

Perbedaan pandangan mengenai dasar Negara sudah terlihat jauh sebelum Konstituante dibentuk, pemicunya ialah disaat Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 27 Januari 1953 di Amuntai, salah satu daerah di Kalimantan Selatan menganjurkan rakyat untuk menampik usulan atau ajakan yang memilih Islam sebagai dasar negara, Soekarno berkata:

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 161.

<sup>42</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, Jilid I* (Jakarta, Prapanca, 1959), 410.

“Jangan mau, jangan mau, jangan mau! karena ini akan menyebabkan daerah-daerah seperti Maluku, Bali, Flores, Kepulauan Kai, dan Sulawesi Utara lepas dari Republik Indonesia,”<sup>43</sup>

Pidato tersebut membuat membuat banyak tokoh Islam terkejut, apalagi Soekarno dahulu pernah mengumbar janji pada saat berbicara di BPUPKI dan PPKI yang akhirnya menghasilkan sebuah titik temu yakni Piagam Jakarta. Berbagai reaksi penolakan disampaikan tokoh Islam, mulai dari Masyumi, NU, PERTI maupun Organisasi Masyarakat Islam lainnya.<sup>44</sup>

Isa Anshary, tokoh Masyumi, mengkritik pidato Presiden itu sebagai pidato yang sama sekali tidak demokratis, inkonstitusional, dan berlawanan dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.<sup>45</sup>

Berbagai fraksi pendukung islam sebagai dasar negara meyakini bahwa islam adalah pilihan yang tepat karena dasar kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Sejalan dengan mayoritas rakyat Indonesia, serta memiliki landasan dasar yang sejalan dengan demokrasi modern.

Sedangkan fraksi-fraksi yang mendukung pancasila menyatakan bahwa nilai yang terdapat didalam pancasila merupakan wujud kepribadian Indonesia, sehingga dapat disimpulkan pancasila merupakan dasar yang tepat bagi bangsa Indonesia.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), 264.

<sup>44</sup> Thaba, *Islam dan Negara*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1992), 171.

<sup>45</sup> Muhammad Syifaul Qulub, “PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM 1945-1959, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 58.

<sup>46</sup> *Ibid*, 59

Jika saja Islam ditetapkan sebagai dasar negara, ditakutkan banyak kelompok masyarakat yang merasa dikesampingkan.<sup>47</sup> Disamping itu, belum ada contoh negara yang jaya dengan islam sebagai dasar negara, justru banyak negara akhirnya malah menjadi negara dengan sistem monarki."

Dalam pidatonya berjudul "Islam Sebagai Dasar Negara", Natsir menyebut bahwa untuk ideologi, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yakni sekularisme (*la-diniyah*), atau paham agama (*dini*).<sup>48</sup> Natsir percaya, Pancasila bercorak *la-diniyah*, karena itu ia sekuler, tidak mengakui wahyu sebagai landasan. Pancasila merupakan hasil dari penggalian makna oleh masyarakat itu sendiri.<sup>49</sup>

Kata Pancasila sendiri berakar dari bahasa sansekerta yang artinya lima prinsip moral dalam sejarah Nusantara kuno,<sup>50</sup> kata Pancasila terdapat dalam buku *Negarakertagama*, sebuah catatan sejarah tentang kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478 M) yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang merupakan penulis dan penyair istana. Soekarno mengambil alih tema ini, tetapi memberikan isi dan makna yang baru. Muhammad Yamin menyatakan bahwa Pancasila adalah hasil eksplorasi mendalam dari jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> *Risalah Perundingan*, 1957, Jilid VII, Konstituante RI, Setjen DPR RI, 111-112

<sup>48</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957), 12.

<sup>49</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, 24-26.

<sup>50</sup> Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Prapanca, t.t.), 437.

<sup>51</sup> Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, 448.

Soekarno berpandangan, Pancasila adalah hasil dari perenungan warisan sosiohistoris Indonesia yang selanjutnya dirumuskan dalam lima prinsip. Soekarno berpandangan bahwa prinsip ketuhanan, misalnya, tidak mempunyai ikatan dengan doktrin ajaran agama manapun. Secara tidak langsung, Tuhan dalam konsepsi Soekarno sepenuhnya bersifat relatif.<sup>52</sup>

Dalam majelis konstituante, Pancasila kembali dipertanyakan oleh perwakilan partai-partai Islam karena masih ragu dengan perumusan itu, salah satu pembicara memasukan Pancasila kedalam kategori konsep otentik, sekuler juga netral. “Pancasila netral tanpa warna”.<sup>53</sup> Natsir menegaskan didalam pidatonya, intepretasi seseorang tentang Pancasila jelas berbeda-beda, bergantung pada tingkat pemahaman orang itu, jadi masih samar-samar sila mana yang menjadi sumber sila yang lain, “atau”, kata Natsir, “apakah sila-sila yang lima itu mempunyai lima sumber pula?”.<sup>54</sup>

KH. Dasuki Siradj, perwakilan dari PKI menyebutkan bahwa Natsir hanya mengutip ayat-ayat al-Quran di bagian tengahnya saja, tidak dari awal hingga akhir.<sup>55</sup> KH. Dasuki Siradj menyampaikan:

“Alasan PKI menolak Islam dijadikan dasar negara bukanlah karna PKI anti agama. melainkan praktek yang dijalankan selama

---

<sup>52</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Agama Sebagai Dasar Negara*, (Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 146.

<sup>53</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957) 27.

<sup>54</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, 26.

<sup>55</sup> Pidato K.H Dasuki Siradj, “*PKI Tidak Akan Membikin Double Boekhouding*”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, 285.

ini oleh para pemimpin Masyumi justru seringkali merugikan masyarakat”.<sup>56</sup>

Roeslan Abdulgani, perwakilan dari fraksi PNI melihat bahwa asas negara ialah suatu prinsip dasar (*principalia*), ia merupakan saripati dari semua ayat dalam konstitusi, dan perundang-undangan serta peraturan lainnya.<sup>57</sup> Roeslan menampik pendapat yang menyebutkan bahwa Pancasila tidak mempunyai suatu kerangka logika yang lemah.

Abdulgani bersandar kepada pendapat Kahin, ia berpendapat: “Pancasila adalah suatu filsafat sosial yang telah matang, sangat besar pengaruhnya atas rangkaian revolusi.<sup>58</sup> Singkatnya, bagi tokoh intelektual nasionalis ini, Pancasila bersumber dari Islam, demokrasi liberal, Marxisme, serta demokrasi yang tidak berkembang di desa-desa yang ada di Indonesia.<sup>59</sup>

Dengan menyebutkan Islam sebagai sumber pertama Pancasila, Roeslan Abdulgani membantah pendapat Natsir yang menyebutkan bahwa “Pancasila adalah suatu ‘abstraksi’ atau hanya sekedar suatu konsep murni, sekuler tanpa agama (*la diniyah*) juga netral. Hadirnya Departemen Agama di semua kabinet. Menurutnya itu menjadi tolak ukur bahwa Pancasila bukanlah sekuler.<sup>60</sup>

Dilain pihak, perwakilan dari NU yakni Saifudin Zuhri berpendapat bahwa didalam sebuah negara dimana hukum-hukum Islam diterapkan, toleransi agama terjamin sepenuhnya. sehingga tidak ada alasan bagi kelompok

---

<sup>56</sup> Pidato K.H Dasuki Siradj, “PKI Tidak Akan Membikin Double Boekhouding”, 288.

<sup>57</sup> *Risalah Perundangan*, 432.

<sup>58</sup> *Risalah Perundangan*, 432.

<sup>59</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Agama Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 151.

<sup>60</sup> *Risalah Perundangan*, 433.

agama minoritas untuk merasa was-was kepada suatu sistem pemerintahan yang berasaskan Islam. Lebih penting lagi, di dalam hukum Islam, segala prinsip Pancasila akan tumbuh menuju kesempurnaan. Karena Pancasila merupakan bagian dari Islam, maka jauh lebih masuk akal untuk memilih sesuatu yang sempurna yakni Islam sebagai dasar negara, bukan Pancasila.<sup>61</sup>

Kasman Singodimedjo “menyerang” PKI dalam pidatonya yang menerima pancasila sebagai dasar negara, padahal menurutnya PKI menganut keyakinan ateisme yang mana tidak mungkin menerima pancasila.<sup>62</sup> Menurutnya, pancasila sendiri memiliki pertentangan didalamnya. sebagai dasar negara, sudah seharusnya pancasila bersih dari kontradiksi. Kasman merasa bahwa ajaran Islam akan sangat berguna bagi bangsa Indonesia apabila dijadikan sebagai dasar negara.

Selanjutnya, Hamka yang merupakan perwakilan dari Masyumi mengemukakan beberapa alasan mengapa dasar negara Indonesia harus Islam, antara lain:

1. Spirit Islam, pekik takbir “Allahu Akbar”, menjadi dorongan bagi para pejuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Yang menuntun terwujudnya proklamasi kemerdekaan bukanlah Pancasila, tapi motivasi menegakkan *Kalimatullah*. Bangsa Indonesia yang beragama Islam mengunakan kemerdekaan itu dengan motivasi Islami, bila mayoritas menuntut haknya, merupakan sesuatu yang wajar.

---

<sup>61</sup> *Risalah Perundingan*, 42.

<sup>62</sup> Pidato Mr.R.H. Kasman Singodimedjo, “Alasan kenapa Islam Menjadi Dasar Negara”, dalam Kusuma dan Khairul (editor), *Pancasila dan Islam*, 86-87.

2. Merealisasikan cita-cita pejuang kemerdekaan. Para pejuang ingin menyudahi penjajahan dengan harapan terbentuknya negara merdeka berdasarkan Islam. Karena Pancasila baru dipopulerkan beberapa tahun lalu, tentu saja para pejuang tidak mengenal Pancasila. Maka mendirikan negara berdasarkan Islam merupakan langkah konkret dalam upaya mewujudkan harapan nenek moyang dengan cakupan yang lebih besar dan lebih bersifat nasional.
3. Kecemasan akan terjadi diskriminasi jika Islam yang dijadikan dasar negara adalah berlebihan. Sebab dasar politik pertahanan negara berdasarkan Islam adalah menjunjung tinggi kesucian nama Tuhan. Bila negara berdasarkan Islam itu telah terbentuk, maka yang akan merumuskan dan mengatur undang-undang dasarnya bukan hanya partai-partai Islam saja, akan tetapi seluruh partai, termasuk PNI, Katolik, Parkindo, serta golongan yang konsekuen percaya kepada Tuhan. Tidak akan ada diskriminasi karena keputusan dihasilkan melalui musyawarah.<sup>63</sup>

K.H. Wahab Hasbullah yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama merasa bahwa Islam bisa menjadi pondasi dalam ketertiban dalam bermasyarakat sehingga K.H. Wahab pun menuturkan:

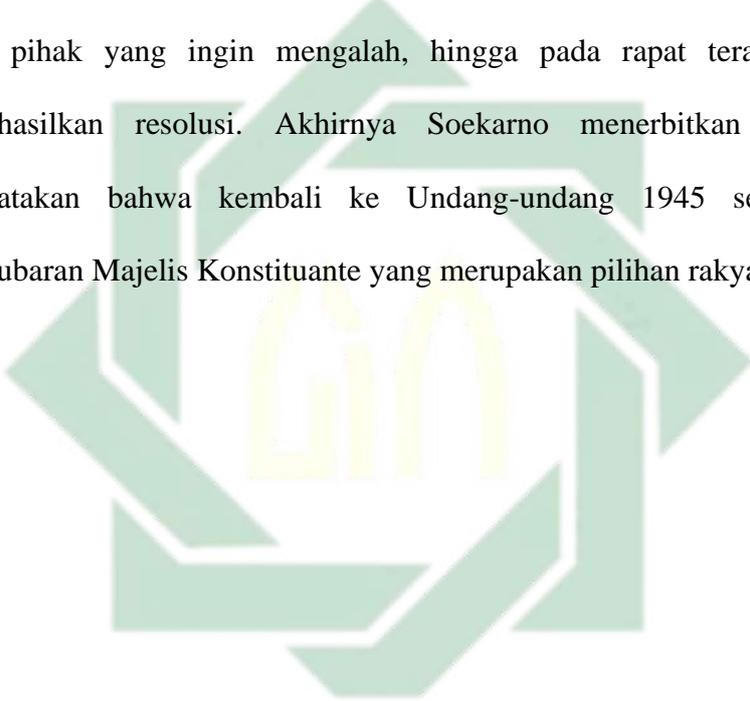
“Misalnya, apa pengertian dari ketuhanan?, dan sejauh mana pengertian ini dibatasi oleh hukum? Jika didasarkan pada Islam, ada persyaratan hukum

---

<sup>63</sup> Yusran R, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), 97-134.

untuk diterapkan secara adil dan benar karena ada konsekuensi yang jelas, seperti kesadaran diri terhadap dosa besar ketika tidak dihindari, dosa besar yang akan memberatkan kita nanti di hadapan Tuhan Mahakuasa, itu berbeda.<sup>64</sup>

Dikarenakan masing-masing pihak tetap teguh dengan pendapatnya dan tidak pihak yang ingin mengalah, hingga pada rapat terakhirnya tidak menghasilkan resolusi. Akhirnya Soekarno menerbitkan dekrit yang menyatakan bahwa kembali ke Undang-undang 1945 serta sekaligus pembubaran Majelis Konstituante yang merupakan pilihan rakyat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>64</sup> Felliard Andre, *NU vis-a-vis negara*, (Yogyakarta: Lkis, 1999)

## BAB III

### LATAR BELAKANG BUBARNYA PARTAI MASYUMI

#### 3.1 Masyumi Pada Saat Demokrasi Terpimpin

Lewat pidatonya dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” Soekarno menjelaskan tentang point- point pokok demokrasi terpimpin terbagi menjadi dua kategori, yakni: (1) setiap orang diharuskan untuk taat kepada kepentingan umum, masyarakat, dan negara. (2) setiap orang akan memperoleh kehidupan yang patut dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>65</sup>

Sejak zaman perjuangan, Soekarno tidak menyetujui dengan diterapkannya demokrasi liberal, gagasan Soekarno mengenai partai tunggal sudah dikemukakan saat awal kemerdekaan, walaupun tidak mendapatkan respon yang positif. Sebaliknya, justru pemerintah mengeluarkan maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden mengenai pembentukan partai politik di Indonesia.<sup>66</sup>

Pemikiran Soekarno mengenai sistem kepartaian tunggal, terpengaruh oleh Lenin yang berhasil menghantarkan partai komunis menjadi pencetus revolusi di Rusia, Soekarno berpandangan bahwa PNI wajib menjadi partai yang memberikan kesadaran pada masa Marhaen supaya bisa melakukan aksi massa revolusioner untuk menggulingkan pemerintahan Belanda di Indonesia.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*. (Jakarta: Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1976), 372

<sup>66</sup> Samsuddin Nazaruddin, *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 187.

<sup>67</sup> Franz Magnis Suseno, *Di Seberang Jembatan Emas*. KOMPAS tanggal 1 juni 2001, Edisi khusus 100 tahun Soekarno 1901- 2001, 67.

Jika diteliti lebih jauh, Demokrasi Terpimpin merupakan antitesis terhadap Demokrasi Liberal yang akan sampai kepada tindakan ultra Demokrasi.<sup>68</sup> Soekarno berpandangan bahwa banyak masalah politik yang muncul pada masa itu tidak lain disebabkan oleh sistem banyak partai dibandingkan dengan beberapa faktor lain. Sebagaimana yang disebutkan Herbert Feith, sistem banyak partai melahirkan koalisi pemerintahan yang terlampau lemah, serta memiliki periode yang singkat.

Sistem ini juga memperburuk berbagai macam konflik dalam lapisan masyarakat serta cenderung menjadikan seluruh kehidupan masyarakat sebagai alat tukar politik. Dalam praktiknya, kata “Terpimpin” mengusur kata “Demokrasi” dengan hadirnya Soekarno sebagai seorang diktator. Hampir seluruh kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, serta yudikatif berada dalam kekuasaannya.<sup>69</sup>

Presiden Soekarno mencanangkan konsepsi Presiden pada tanggal 21 februari 1957. Konsepsi Presiden berisi gagasan untuk melaksanakan Demokrasi terpimpin. Untuk dapat menerapkan demokrasi terpimpin perlu dibentuk Kabinet gotong royong dan Dewan Nasional. Sementara konsepsi ini ditolak oleh beberapa partai, mulai dari Masyumi, PNI, PSII, Partai Katolik dan Partai Rakyat Indonesia Bung Tomo.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> A Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988, 174.

<sup>69</sup> Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 177-178.

<sup>70</sup> Mohammad Natsir, *Capita Selecta III*, 33.

Natsir<sup>71</sup> selaku ketua umum Masyumi dalam pidatonya pada tanggal 7 November 1956 dalam rangka ulang tahun Masyumi yang ke-11, menyinggung mimpi Soekarno yang ingin menghilangkan partai- partai itu justru akan membuat demokrasi ikut hilang hingga pada akhirnya akan melahirkan diktator. Natsir mengingatkan kepada semua pihak bahwa demokrasi itu merupakan sistem yang rumit. Oleh karena itu harus siap dengan segala konsekuensinya, jika tidak dikawal dengan baik, maka bukan tidak mungkin demokrasi mengarah kepada anarki.

Natsir juga berpandangan bahwa selama demokrasi masih ada, selama itu pula lah partai akan tetap ada, demokrasi bukan semata- mata cara yang dapat diubah kapanpun karena keadaan. Akan tetapi, demokrasi merupakan jalan hidup atau pandangan hidup, Natsir mengakui bahwa penerapan demokrasi sebagai suatu sistem memanglah sulit, oleh sebab itu diperlukan pengalaman yang panjang serta harus mengalami berbagai cobaan yang pahit.

Demokrasi menurut Natsir, “tidak dapat terhidang dalam talam emas, sebaliknya ia seringkali meminta korban.” Salah satu syarat demokrasi adalah setiap pendukung harus menggunakan partai sebagai kendaraan menurut peraturan yang wajar serta pendukungnya harus jujur dalam menegakan nilai- nilai dalam hidup. Jangan sampai dijadikan tujuan untuk menginjak- injak nilai hidup. Selanjutnya Natsir menghimbau para politisi dan tentara untuk menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Natsir merupakan satu satunya orang yang dicap sebagai pemberontak karena terlibat PRRI. Akan tetapi pada tahun 2008 diangkat sebagai pahlawan nasional berkat jasa- jasanya kepada Republik Indonesia serta pidatonya mengenai pancasila.

<sup>72</sup> Delliari Noer, *Partai Politik di Pentas Nasional*, (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2000), 378-379.

Diawali dengan munculnya dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959,<sup>73</sup> kembalilah Indonesia pada UUD 1945 sebagai konstitusi resmi negara Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu menandai lahirnya demokrasi terpimpin. Dekrit ini mengakhiri secara formal demokrasi parlementer yang resmi bergulir pada tahun 1956 dibawah naungan UUDS 1950. Sejak saat itu juga setiap ada usul mengenai dasar negara yang bertujuan menggantikan pancasila secara konstitusional tidak mungkin serta tidak dibenarkan, terkecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pilihan rakyat menghendaknya, merujuk pada pasal 37 UUD 1945.<sup>74</sup>

Bersamaan dengan kembalinya Indonesia kepada UUD 1945 yang menetapkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Soekarno memiliki kesempatan besar untuk kembali menata ranah politik Indonesia menurut gagasan yang ada di dalam kepalanya. Dengan terbentuknya Dewan Nasional dan komando politik yang ada dalam kendali Soekarno, dia yakin bahwa perpecahan negara dapat diatasi dengan baik. Tekadnya untuk memulihkan stabilitas politik yang ideal dilaksanakan dengan cara melibatkan semua elemen politik, mulai dari DPR yang sementara ini sedang dirubah susunan keanggotaannya, juga kabinet maupun Dewan Nasional.<sup>75</sup>

Setelah DPR dibubarkan, Soekarno menyusun parlemen baru yang dinamakan, DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat- Gotong Royong). Lembaga

---

<sup>73</sup> Dekrit yang menetapkan bubarnya Konstituante dan kembali berlakunya UUD 1945.

<sup>74</sup> Maarif, A Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988, 176.

<sup>75</sup> Alfian, Nazaruddin Syamsuddin (peny), *Profil Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1991), 174.

ini terdiri dari orang-orang partai serta wakil golongan karya, termasuk politisi, militer, buruh, petani, ulama, pemuda, wanita, intelektual, dan pendidik yang semuanya berjumlah 283 orang. Jumlah golongan fungsional di DPR-GR itu lebih banyak dibandingkan jumlah wakil partai, yang menandakan bahwa presiden tidak senang dengan partai.<sup>76</sup>

Terhitung tanggal 24 juni 1960, presiden selesai menyusun DPR-GR, penyusunan komposisi DPR-GR digelar di Istana Tampaksiring, Bali, dengan mengundang ketua dari ketiga partai besar yakni, PNI, NU, PKI dan juga Kolonel Wiluyo Poespoyudo yang mewakili TNI-AD. Anggota DPR-GR baru dilantik saat 25 juni 1960.<sup>77</sup>

Tidak seorangpun wakil dari Masyumi yang ditunjuk dalam DPR-GR, Masyumi diabaikan, ditambah lagi Masyumi harus membuktikan tidak terlibat dalam Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia. Jika tidak mampu membuktikan, maka nasib Masyumi sudah dipastikan akan dibubarkan.<sup>78</sup>

Soekarno menyampaikan pidato pada upacara proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1959, pidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Dekrit 5 juli 1959 serta garis kebijaksanaan Presiden dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin.

Dalam sidang yang digelar pada bulan September 1959, Dewan Pertimbangan Agung dengan suara bulat mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden dijadikan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan juga

---

<sup>76</sup> Delliar Noer, *Partai Politik di Pentas Nasional*, (Bandung, Mizan, 2000), 393.

<sup>77</sup> Poesponegoro, Marwati, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 312.

<sup>78</sup> Delliar Noer, 393.

dinamakan Manipol (Manifesto Politik Indonesia). Usulan tersebut diterima baik oleh Soekarno. Pada sidangnya tahun 1960, MPRS dengan ketetapan MPRS no.1/MPRS/1960 menetapkan manifesto politik itu menjadi GBHN.<sup>79</sup>

GBHN mengacu pada UUD 1945 adalah tugas MPR, akan tetapi dikarenakan kedudukan Soekarno yang sudah begitu kuat, maka calon anggota MPRS harus menyatakan kesetiaannya kepada Manipol sebagai syarat pengangkatan sebagai anggota. MPRS tidak memiliki kemungkinan untuk mengubah Manipol yang telah menjadi GBHN. DPR-GR, MPRS bisa diartikan sebagai stempel pengesahan seluruh pemikiran, gagasan, dan keinginan Soekarno. Ditambah lagi dengan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS pada tahun 1962. Yang mana merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.<sup>80</sup>

Konsep pemikiran Soekarno tentang Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) pada masa demokrasi terpimpin merupakan kelanjutan pemikiran yang telah ia rumuskan sejak tahun 1920-an. Soekarno muda melukiskan gagasan “idealnya” ke dalam tulisan Islam, Nasionalisme dan Marxisme di tahun 1926, tulisan itu dimuat di *suluh Indonesia Muda* secara berseri.

Dalam tulisannya, Soekarno melihat bahwa ketiga ideologi tersebut perlu dilebur menjadi satu untuk melawan Imperialisme Belanda. Karena untuk mengalahkan kaum penjajah diperlukan suatu kekuatan yang efektif yang mana

---

<sup>79</sup> Poesponegoro, Marwati, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),313-314.

<sup>80</sup> Deliar Noer, 394.

menghimpun segala unsur kekuatan politik yang terdapat di dalam masyarakat.<sup>81</sup>

### 3.2 Keluarnya NU Dan PSII dari Masyumi

Sekalipun pemimpin-pemimpin umat sering berbicara tentang pentingnya persatuan dikalangan umat Islam, ternyata implementasinya tidak semudah yang dijelaskan. Perpecahan umat merupakan cerminan dari perpecahan para pemimpinnya. Mereka adalah tempat umat mewakilkan harapan dan kepercayaannya. Pada kongres November 1945, para pemimpin umat telah mencapai suatu kata sepakat tentang Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kesepakatan november itu tidak dapat bertahan lama. Di bulan Juli 1947 PSII resmi meninggalkan Masyumi, disusul NU yang keluar pada tahun 1952, hal ini mengakibatkan dampak yang lebih besar dibandingkan keluarnya PSII.<sup>82</sup>

Peran NU di dalam perkembangan Masyumi tidak dapat dipungkiri, bahkan tidak berlebihan jika NU disebut sebagai salah satu tulang punggung yang menyokong Masyumi. hingga dipilihlah tokoh pendiri NU Hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asy'ari menjadi Ketua Umum Majelis Syura (Dewan Partai) dengan dibantu Ki Bagus Hadikusuma (Muhammadiyah) sebagai

---

<sup>81</sup> Soekarno, *Islam, Nasionalisme, Marxisme*, (Yogyakarta, Pustaka Kendi, 2000)

<sup>82</sup> Delliar Noer, *Partai Politik di Pentas Nasional*, 115-116..

Ketua Muda I, K.H. Wahid Hasyim (NU) Ketua Muda II dan Mr. Karsman Singodimedjo (Muhammadiyah).<sup>83</sup>

Semenjak berdirinya, Masyumi terus menerus melakukan pergerakan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Hal ini lebih dipermudah lagi disebabkan Masyumi didukung oleh organisasi Islam besar, salah satunya Nahdlatul Ulama yang memenuhi tubuh Masyumi. Karena gerakan yang masif, pada 31 Desember 1950, Masyumi telah mencatatkan jumlah anggota kurang lebih 10 juta dengan 237 Cabang, 1.080 Anak Cabang serta 4.982 Ranting di seluruh Indonesia. Perkembangan yang pesat ini menjadikan Masyumi partai Islam terbesar.<sup>84</sup>

Didalam kongres NU ke-16 yang diselenggarakan di Purwokerto diserukan agar, “Nahdiyin membanjiri partai politik Masyumi” dan diputuskan NU lah yang akan menjadi tulang punggung Masyumi.<sup>85</sup> Sebagai basis kekuatan umat Islam yang perlahan bertumbuh dan berkembang dengan baik, kekuatan NU tentu sangat diperhitungkan oleh Masyumi. Bergabungnya NU ke dalam partai Masyumi. Dengan ini membuka peluang yang besar bagi NU untuk ikut

Akan tetapi, di dalam tubuh Masyumi berkembang sentimen antara Islam Modernis dan Islam Tradisionalis yang kian melebar. Banyak Kiai NU yang merasa tidak nyaman dengan kondisi Masyumi yang sudah tidak lagi bisa menjadi kendaraan aspirasi politik. Kebuntuan ini sudah dicoba untuk

---

<sup>83</sup> Idwar Anwar, "TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI: PECAH KONGSI NU-MASYUMI JELANG PEMILU 1955, *Al-Qalam*, 26, 359.

<sup>84</sup> Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian di Indonesia.*, (Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1951), 14.

<sup>85</sup> Fealy Greg. *Ijtihat Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. (Yogyakarta: LKIS, 2003), 53-54.

diselesaikan lewat perundingan, akan tetapi tidak menemui titik temu dalam kecocokan struktur organisasi partai serta praktik demokrasi yang bagi keyakinan NU jelas sangat merugikan Perjuangan golongan islam dan umum, maka NU menyatakan keluar dari partai Masyumi.<sup>86</sup>

Sebagai partai yang menampung seluruh kekuatan Islam, awalnya posisi Ulama (Kiai) mendapat posisi yang mulia, seperti dibentuknya Majelis Syuro yang jelas memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan keputusan partai dalam Masyumi. Akan tetapi, menjelang tahun 1950-an, situasi berubah lewat perubahan AD/ART partai Masyumi terkait Dewan Syuro pada Mukhtar IV Masyumi pada tanggal 15 desember 1949, yang membatasi peran politik ulama dalam memberikan fatwa.<sup>87</sup>

Perubahan AD/ART ini membuat K.H Wahab merasa geram. Namun penolakan itu ternyata tidak mendapat respon yang baik dari pengurus Masyumi. Hal inilah yang semakin memperumit situasi di dalam tubuh Masyumi. Ditambah lagi munculnya kecenderungan golongan “modernis” dalam internal Masyumi yang seakan meremehkan keberadaan ulama yang merupakan mayoritas ialah NU. mengakibatkan tersinggungnya kelompok “tradisional” hingga muncullah pertentangan. Konflik ini makin membara dan kesenjangan antara “modernis” dengan “tradisional” di dalam Masyumi semakin lebar.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Idwar Anwar, "TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI: PECAH KONGSI NU-MASYUMI JELANG PEMILU 1955, *Al-Qalam*, 26, 360.

<sup>87</sup> Delliari Noer, *Partai Politik di Pentas Nasional*, 80-81.

<sup>88</sup> Saifullah Ma'shum, *K.H Abdul Wahab Chasbullah: Perintis, Pendiri dan Penggerak NU*, (Jakarta: Panitia Penulisan Buku Sejarah Perjuangan K.H. Abdul Wahab Chasbullah, 1999), 117.

K.H Saifuddin Zuhri melukiskan situasi yang dirasa agak pahit ini dengan kalimat: “Soalnya sederhana saja, Nahdlatul Ulama merasa diperlakukan tidak adil oleh dominasi golongan dan perorangan yang kuat kedudukannya lantaran struktur organisasi yang berlaku.<sup>89</sup> Sejak itu pula, jurang pemisah antara NU dan Masyumi kian melebar dan akan sulit untuk diperbaiki. Melihat situasi itu, K.H. Wahab, selaku Pimpinan NU yang menggantikan K.H. Hasyim As’ari yang wafat, tidak bisa menerima. Sebagai politisi dan ulama, K.H. Wahab melihat kecenderungan peran NU dalam politik sudah tidak memberikan manfaat, terutama akibat konflik kepentingan yang belum bisa terselesaikan yang cenderung tidak menguntungkan bagi NU. Padahal dalam pandangan K.H. Wahab, NU memiliki potensi yang sangat besar, terlebih jika menjadi partai politik.<sup>90</sup>

Peristiwa yang membuat NU semakin yakin untuk keluar dari Masyumi yakni pada tahun 1952 ketika Masyumi menetapkan K.H Faqih Usman dari Muhammadiyah sebagai Menteri Agama dari beberapa calon alternatif yang ada, termasuk calon yang diusulkan oleh NU.<sup>91</sup> Hal ini terjadi tidak terlepas dari perubahan peraturan kelembagaan setelah terpilihnya Natsir sebagai ketua pada tahun 1949 terkait pembatasan otoritas politik Majelis Syuro.

Dalam muktamar NU ke-19 di Palembang, NU dengan yakin menyatakan keluar secara organisatoris, memutuskan untuk keluar dari

---

<sup>89</sup> Saifuddin Zuhri, K.H Abdulwahab Chasbullah: *Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Yamunu, 1972), 58.

<sup>90</sup> Fealy Greg. *Ijtihat Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. (Yogyakarta: LKiS, 2003), 107-108.

<sup>91</sup> *Ibid*, 110.

Masyumi dengan jumlah perbandingan suara sebanyak 61 setuju, 9 menolak, 7 abstain. Nahdiyin pun menyambut keputusan ini dengan elegan, meski sebagian menolak dengan berbagai alasan. Dilain pihak, sebagian kalangan Masyumi menyangkan dan mengupayakan supaya keputusan itu tidak berhasil, dan sebagian lain sudah menduga terhadap langkah yang akan diambil.<sup>92</sup>

Peristiwa ini mengguncang Masyumi, karena NU mempunyai pengikut yang cukup besar, terutama di tiga propinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan. Jawa Timur. Terdapat beberapa faktor yang membuat NU kuat di tiga propinsi tersebut, mulai dari banyaknya jumlah pesantren serta pengaruh kyai, dua hal tersebut merupakan penyokong NU.

Dalam memperebutkan suara, para kyai memiliki peran yang strategis. Khususnya di daerah pedesaan, sedangkan pada saat itu lebih dari 70% wilayah Indonesia adalah pedesaan. Sebagai suatu gerakan agama tradisional, NU dengan beratus-ratus kyainya mendapatkan tulang punggung penyokongnya terutama dari daerah pedesaan. Di tingkat pedesaan, kyai tidak saja berfungsi sebagai pemimpin agama dan keruhanian, akan tetapi serangkap juga sebagai pemimpin politik, bisa disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara NU dengan Masyumi sendiri merupakan konflik antara islam konservatif dan islam modern di ranah politik.<sup>93</sup>

Berdiri kembalinya PSII dan berpisahannya NU jelas membuat lubang yang dalam bagi Masyumi, PSII lebih memilih untuk lunak sebagaimana gaya

---

<sup>92</sup> Idwar Anwar, "TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI: PECAH KONGSI NU-MASYUMI JELANG PEMILU 1955, *Al-Qalam*, 26, 363.

<sup>93</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 117-118

politik NU yang kooperatif terhadap Pemerintah, yang mana merupakan pilihan yang realistis pada saat itu.<sup>94</sup> Perbedaan sikap antar partai Islam terkait kebijakan Presiden jelas terlihat dalam terbentuknya kabinet Djuanda.

Perbedaan pandangan tersebut kemudian melahirkan dua kubu dalam menyikapi demokrasi terpimpin ala Soekarno. *Pertama*, kubu liga demokrasi, dibentuk pada tanggal 24 maret 1960, liga demokrasi diinisiasi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari PSI, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), beserta dua tokoh dari NU, yakni KH. M. Dachlan dan Imron Rosjadi. Kubu ini muncul sebagai oposisi demokrasi terpimpin, liga ini merupakan bentuk protes atas dibubarkannya DPR pilihan rakyat pada tahun 1955.

Kubu selanjutnya adalah Liga Muslimin yang terdiri dari NU, PSII, Perti, liga muslimin merupakan kelompok yang mendukung gagasan Soekarno.<sup>95</sup> Ketiga partai ini mampu bertahan semasa periode Demokrasi Terpimpin, dikarenakan sanggup menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi terpimpin sebagaimana yang diminta oleh Presiden.<sup>96</sup>

### **3.3 Tuduhan Keterlibatan PRRI Dan Pembubaran Masyum**

Jauh sebelum PRRI terbentuk pada tanggal 15 februari 1958, di banyak daerah sudah terbentuk dewan daerah. Dewan- dewan daerah ini terbentuk

---

<sup>94</sup> Syafi'I Ma'arif, *Islam dan Politik Indonesia: Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996), 55.

<sup>95</sup> Syafi'I Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. (Jakarta: Gema Insani, 1998), 64-65.

<sup>96</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 388.

dalam rangka reaksi terhadap situasi kepemimpinan di pusat, mulai dari kepemimpinan di tingkat Angkatan Darat (AD) maupun pemerintah pusat. Munculnya ketidakpuasan inilah yang merangsang pimpinan AD di daerah untuk mengambil inisiatif dalam pembentukan dewan- dewan di daerah.

Pada tanggal 21 hingga 24 november 1956 diselenggarakan reuni divisi banteng di Padang, dalam pertemuan itu menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya menuntut dilaksanakannya perbaikan progresif dan radikal di segala lini, termasuk pimpinan angkatan darat. Mereka juga menuntut diselenggarakannya pemberian otonomi luas kepada daerah, serta pembentukan Dewan Banteng. Keanggotaan dewan banteng terdiri dari 17 orang. Dipimpin oleh Letkol. Ahmad Husein.<sup>97</sup>

Munculnya Dewan Banteng memberikan pengaruh kepada daerah-daerah lain, hingga munculah Dewan Gajah dibentuk berdasar ikrar 48 perwira pada tanggal 4 desember 1956. Mereka berikrar untuk mengambil langkah tegas serta revolusioner dalam menghadapi kondisi dan merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945. Ketua Dewan Gajah yakni M. Simbolon memegang kekuasaan sipil di Sumatera Utara. Simbolon menjelaskan bahwa ia memutuskan hubungan dengan pusat di Jakarta, hingga pusat kembali dipimpin oleh orang yang jujur dan mempunyai integritas.<sup>98</sup>

Bersamaan dengan munculnya rasa kecewa para perwira di daerah terhadap Angkatan Darat di serta pemerintah pusat, suhu politik di Jakarta kian

---

<sup>97</sup> R.Z Leirissa, *PRRI-PERRESTA: Strategi membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta: Grafiti, 1997), 39-43.

<sup>98</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945- 1967* (Jakarta: LP3ES, 1988), 186-187.

memanas, tensi yang mulai meningkat ini tidak lepas dari faktor yang ditimbulkan Soekarno dan PKI. Soekarno telah memperkuat kekuasaannya dengan melanggar UUDS. Sementara PKI dibawah perlindungan Soekarno mengambil alih perusahaan- perusahaan Belanda.

Pengambilalihan tersebut dikritik oleh Syarifuddin Prawingara, karena dinilai dilakukan tanpa rencana yang matang, yang mana akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Kritik tersebut dibalas Soekarno dengan menuduh mereka yang melakukan kritik sebagai kelompok kapitalis yang mendukung kepentingan Belanda. Bahkan lebih jauh lagi, Soekarno mendukung PKI bersamaan dengan ormas lainnya dalam melakukan aksi teror dan intimidasi.<sup>99</sup>

Teror dan intimidasi itu diarahkan kepada tokoh- tokoh politik yang berseberangan dengan kebijakan Soekarno, terlebih lagi pimpinan partai Masyumi dan PSI. keadaan inilah yang memaksa beberapa tokoh politik seperti Natsir, Burhanudin Harahap, Syarifuddin Prawingara dan Soemitro Djojohadikusumo keluar dari Jakarta menuju Sumatera.<sup>100</sup>

21 juli 1959, Presiden Soekarno memanggil pimpinan Masyumi dan PSI. pada pertemuan yang berdurasi kurang lebih 10 menit itu, Soekarno disertai pimpinan staf ketiga angkatan, jaksa agung, kepala kepolisian, kepala staf perang tertinggi, menteri penerangan serta direktur kabinet. Presiden menyerahkan pertanyaan yang wajib dijawab oleh para petinggi partai itu secara

---

<sup>99</sup> Andrey R.Kahin, George Mc T Kahin, *Subversi sebagai politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, (penerjemah) R.Z. Leirissa (Jakarta: Grafiti, 1997), 139-140 dan 148.

<sup>100</sup> Nazaruddin, Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989), 63-64.

tertulis dan harus dijawab dalam waktu satu minggu, Masyumi diwakili Prawoto, M. Yunan, sementara PSI diwakili Sjahrir dan Soebadio Sastrotomo.<sup>101</sup>

Pertanyaan pertama, benarkah Masyumi menafikan dasar dan tujuan negara? yang kedua, apakah benar jika Masyumi ingin mengubah dasar dan tujuan negara? Dengan tegas Masyumi menyangkal dan menjelaskan bahwa apa yang dianggap partai dasar dan tujuan negara ialah apa yang tercantum didalam dalam Mukaddimah UUD 1945, bukan yang tertera di dalam manipol. Hingga sampailah pada kesimpulan bahwa Masyumi tidak menolak dasar negara serta tidak ada keinginan untuk merubahnya.

Masyumi merujuk pada kongres tahun 1952 yang berjuang untuk mencapai tujuan serta dasarnya dengan mengumpulkan tenaga umat dengan teratur, membangun kehidupan lahir dan batin, saling pengertian dan ahlak yang baik pada umat, untuk meraih segala syarat pendukung dalam cita – cita islam sebagai jalan hidup (*Way of life*) yang menjadi rahmat kebahagiaan bagi seluruh mahluk (*Rahmatan Lil'Alamin*).

Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan pemberontakan PRRI. Pertanyaan ini juga berkaitan dengan ketentuan Peetapan Presiden No.7 tahun 1959, Pasal 9 ayat 1 tentang partisipasi partai. Masyumi bersikukuh tidak berperan dalam pemberontakan PRRI. Karena Penpres baru mulai berlaku tanggal 31 desember 1959 disaat para petinggi yang terlibat dengan PRRI sudah resmi keluar dari struktur kepengurusan.

---

<sup>101</sup> Sjamsudin, Nazaruddin, *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktik*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 199.

Pimpinan baru dipilih pada kongres bulan april 1959 yang mana tidak terdapat seorang nama pun yang terlibat dalam PRRI. Masyumi juga berpandangan bahwa mulai 9 September cabang yang terdapat di Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan, Sulawesi Utara dan selatan telah dibekukan oleh pemerintah juga hubungan organisasi dengan pimpinan pusat Masyumi sudah diputus.<sup>102</sup>

Soekarno tidak menerima alasan yang dikemukakan oleh Masyumi. Bahkan Soekarno memiliki ambisi untuk segera membubarkan Partai Masyumi. Alasan yang paling kuat ialah karna Masyumi tertuduh sebagai partai yang melakukan pemberontakan, para pemimpinnya turut serta dan jelas terlibat dalam pemberontakan atau memberikan bantuan. Sedangkan Masyumi tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota- anggotanya itu. Soekarno menggambarkan pembubaran Partai Masyumi sebagai moral Revolusi.

Soekarno menegaskan bahwa “berdasarkan moral Revolusioner, penguasa wajib menghancurkan tiap- tiap kekuatan asing maupun bukan asing, pribumi maupun non pribumi yang membahayakan keselamatan atau berlangsungnya revolusi”. Juga Soekarno dikuatkan dengan oleh pendapat Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa Masyumi dan PSI terjerat penpres No.7/1959 tentang hak hidup partai- partai tertentu yang dituduh turut serta dalam pemberontakan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Delliari Noer, *Partai Politik di Pentas Nasional*, 431.

<sup>103</sup> Maarif, A Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988, 187-188.

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1960, bertepatan dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI yang ke -15, Masyumi menerima surat dari direktur kabinet presiden yang menyatakan bahwa masyumi, harus membubarkan diri. Surat itu mengatakan bahwa “paduka yang mulia presiden telah berkenan memerintahkan kami” untuk menyampaikan keputusan presiden no.200/1960 bahwa partai Masyumi wajib dibubarkan.

30 hari setelah tanggal Ketetapan Presiden ini dilampirkan, tepatnya ditanggal 17 Agustus 1960, Pimpinan pusat Masyumi harus menyatakan bahwa Partainya telah bubar. Pembubaran ini wajib diberitahukan secepatnya kepada presiden. Jika tidak, partai Masyumi akan dianggap sebagai “partai terlarang”.<sup>104</sup> Tidak sampai satu bulan setelah dikeluarkannya Keppres no.200 tahun 1960. Pimpinan partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk mematuhi ketentuan dalam Ketetapan Presiden. Di tahun berikutnya, sebagian tokoh pimpinan partai ditangkap dan dipenjarakan di bawah rezim Soekarno.<sup>105</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>104</sup> Deliar Noer, 414.

<sup>105</sup> Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959- 196*, 75-76..

## BAB IV

### DAMPAK YANG MUNCUL PASCA BUBARNYA PARTAI MASYUMI

#### 4.1 Upaya Menghindari Label Partai Terlarang

Meletusnya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang segera diredam oleh Militer Indonesia ditambah dugaan keterlibatan pimpinan Masyumi di dalamnya menjadikan Masyumi perlu bekerja ekstra untuk menjawab tuduhan atas keterlibatan Masyumi dalam Pemberontakan PRRI secara organisatoris

Fase ini merupakan fase yang berat bagi Partai, mulai dari tuduhan keterlibatan PRRI, penangkapan Kasman Singodimedjo yang dalam pidatonya dianggap mendukung pemberontakan PRRI serta cabang di Sumatera dan Sulawesi dilarang melakukan kegiatan partai oleh pihak militer dengan alasan yang tidak berdasar.<sup>106</sup>

Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres no.7 tahun 1959 tentang Syarat- syarat dan Penyederhaan kepartaian, lewat Penpres ini Soekarno jelas Menuduh Masyumi terlibat dalam pemberontakan:

*“sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin- pemimpinnya turut serta melakukan dalam pemberontakan- pemeberontakn atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota- anggotanya itu.”<sup>107</sup>*

---

<sup>106</sup> Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, Penerj. Tony Pasuhuk. (Jakarta: Mizan, 2013), 253.

<sup>107</sup> Pasal 9 (1) Poin 3 Penpres no.7 tahun 1959. Lihat lampiran

Tentu para pimpinan Masyumi tidak hanya berdiam diri, Prawoto Mangkusasmito yang tidak lain merupakan Ketum Masyumi hasil Mukhtar ke- IX.<sup>108</sup> Memberikan klarifikasi atas tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI, yang berakibat munculnya putusan agar segera membubarkan diri. Penpres no.7 tahun 1959 yang digagas oleh Presiden Soekarno mendapatkan penolakan dari banyak kalangan terkhusus dari Masyumi.<sup>109</sup>

Prawoto menyikapi bahwa Penpres tersebut merupakan materi hukum yang rancangannya tidak boleh sembarangan, terutama pasal yang sebenarnya merupakan wewenang legislatif. Bukan hanya Penpres no.7 tahun 1959, akan tetapi Soekarno juga mengeluarkan Penpres no 13 tahun 1960, peraturan yang memuat tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai- partai.<sup>110</sup> Sebuah peraturan yang membuat otoritas presiden semakin kuat.

Dengan terbitnya peraturan- peraturan ini, Masyumi semakin terjepit, karena peraturan ini menetapkan mekanisme pembubaran sebuah partai beserta dasar hukumnya. Selain berjuang lewat peradilan, pimpinan Masyumi juga menyelenggarakan pertemuan- pertemuan dengan pihak Istana terkait solusi atas masalah yang sedang dihadapi. usaha- usaha yang ditempuh Masyumi di pengadilan merupakan dilema tersendiri, lebih baik membubarkan diri secara sukarela atau dibubarkan paksa sehingga dicap sebagai partai terlarang.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, Penerj. Tony Pasuhuk. (Jakarta: Mizan, 2013), 255.

<sup>109</sup> Statement resmi Masyumi dalam menanggapi tuduhan. Lihat lampiran

<sup>110</sup> Penpres no 13 tahun 1959, lihat lampiran

<sup>111</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisa Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965* (Bandung. Penerbit Grafiti 1987), 416.

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan pimpinan partai masyumi. Pertama mengenai apakah benar pimpinan partai Masyumi terlibat dalam pemberontakan atau dengan jelas memberikan bantuan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Penpres dan berlaku sejak tanggal 31 desember 1959. Sebelum Penpres itu berlaku, atau bertepatan dengan tanggal 27 april 1959, Partai Masyumi memiliki susunan kepengurusan berikut ini:

Prawoto Mangkusasmito	Ketua Umum
Dr.H. Sukiman Wirjosandjojo	Wakil Ketua I
Mr. Mohammad Roem	Wakil Ketua III
M. Yunan Nasution	Sekretaris Umum
Mr. Kasma Singodimerdjo	Anggota
Anwar Harjono	Anggota
K.H Taufiqurrachman	Anggota
A.R. Baswedan	Anggota
Ardiwinangun	Anggota
K.H Hasan Basri	Anggota
Osman Raliby	Anggota
Mr. Sindiran Djajadiningrat	Anggota
Sholeh Iskandar	Anggota
K.H Achmad Azhary	Anggota
Nj. Sunarjo Mangunpuspito	Anggota
Nj. Samsuridjal	Anggota

Berdasarkan susunan kepengurusan pimpinan partai Masyumi diatas, terhitung sejak tanggal 31 desember 1959 tidak ada satu pun pemimpin masyumi yang turut serta dalam pemberontakan. Begitu pula dengan pemimpin Masyumi di daerah.

Bahkan pimpinan Masyumi di dalam setiap kesempatan mengirim surat ke daerah- daerah, tidak pernah lagi mengirim surat surat kepada daerah yang sedang bergejolak. Sebagaimana surat yang dikirim partai Masyumi no.72/M.VIII/59 pertanggal 14 maret 1959. Surat yang dikirimkan senantiasa menggunakan kata- kata “Kepada dewan Pimpinan Wilayah/Cabang Masyumi di seluruh Indonesia (kecuali daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan dan Sulawesi Utara/Tengah”.

Terkait sikap Masyumi terhadap PRRI serta anggota yang terlibat dalam PRRI. Pimpinan Partai Masyumi sudah dengan jelas menyalahkan pembentukan PRRI dengan menyatakan bahwa pembentukan PRRI merupakan Inkonstitusional. Pernyataan ini dikeluarkan pada tanggal 17 february 1958. Sebelum terjadinya PRRI, Masyumi telah menyatakan sikapnya yakni tidak setuju dengan sikap daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI, serta penggunaan senjata dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah pusat dan daerah. Perihal kecenderungan Soekarno yang menyalahkan anggota Masyumi yang terlibat dalam PRRI, partai Masyumi sudah merespon sebelum itu dengan

cara tidak mengakui lagi adanya Masyumi di daerah- daerah yang terlibat PRRI, juga memutuskan segala hubungan yang ada.<sup>112</sup>

Hingga pada akhirnya berdasarkan kesepakatan dalam rapat pimpinan partai, partai Masyumi mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang berisi tentang, pembubaran Masyumi. Surat ini ditanda tangani oleh Ketum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito serta sekretaris umum M. Yunan Nasution. Di dalam surat tersebut menyatakan bahwa: “Pimpinan partai Masyumi menyatakan, bahwa dengan adanya keputusan presiden no. 200 tahun 1960 itu, Masyumi bubar, termasuk bagian- bagiannya (Majelis Syuro dan Muslimat).<sup>113</sup>

Jika diteliti lebih dalam lagi, sikap yang ditempuh Masyumi yakni membubarkan diri didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, meskipun Masyumi merasa tidak bersalah dan dasar hukum yang digunakan oleh Presiden Soekarno dalam pembubaran Masyumi sangat lemah, realitanya tetap saja Masyumi telah dibubarkan Soekarno melalui Keputusan Presiden no. 200 tahun 1960. *Kedua*, seandainya Masyumi enggan membubarkan diri, Masyumi akan tetap bubar bahkan dianggap sebagai partai terlarang, maka lebih baik membubarkan diri daripada dilabeli sebagai partai terlarang.

*Ketiga*, jika Masyumi tidak membubarkan diri justru akan berakibat buruk terhadap lembaga- lembaga yang pernah berafiliasi dengan Masyumi. *Keempat*, pimpinan, anggota beserta keluarganya secara tidak langsung akan mendapatkan teror serta dicap buruk jika Masyumi tidak membubarkan diri, hal

---

<sup>112</sup> Insan Fahmi Siregar, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)”, (Depok : Universitas Indonesia, 2013, 157-158.

<sup>113</sup> Insan Fahmi Siregar, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960), 165

ini pada akhirnya hanya akan menyisakan penderitaan bagi keluarga besar Masyumi.

*Kelima*, jika Masyumi tidak membubarkan diri maka besar kemungkinan anggota Masyumi yang duduk di dalam pemerintahan akan dipecat. Begitu juga halnya terhadap anggota Masyumi yang bekerja di luar pemerintahan dan wiraswasta bisa jadi tidak dapat bekerja lagi, ataupun anggota Masyumi yang memiliki perusahaan, bisa jadi perusahaannya akan ditutup. Keenam, jikalau Masyumi tidak membubarkan diri dan dicap menjadi partai terlarang, akan mengakibatkan aset- aset Masyumi disita secara paksa oleh pemerintah dan menjadi milik pemerintah.<sup>114</sup>

Sudah menjadi kebiasaan Masyumi sejak didirikan hingga saat ini selalu berusaha untuk memperkuat hukum, serta selalu berpegang teguh kepada UUD yang berlaku, atas dasar ini pula Masyumi mematuhi Keputusan Presiden no.200 tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi. *Kedua*, Masyumi menolak tuduhan yang dituduhkan kepada mereka, yakni tentang keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Masyumi merasa kecewa terhadap tuduhan yang dilayangkan Presiden, padahal PM Djuanda sebagai wakil pemerintahan pada tanggal 28 februari 1958 dihadapan DPR menyatakan:

“Maka pemerintah berpendapat, bahwa meskipun orang-orang, yang tersangkut dalam pemberontakan itu adalah tokoh-

---

<sup>114</sup> Insan Fahmi Siregar, “sejarah pertumbuhan dan perkembangan partai Masyumi (1945-1960)”, (Depok : Universitas Indonesia, 2013, 166.

tokoh dari sesuatu partai politik, namun yang dianggap melanggar hukum itu bukanlah partai politik, akan tetapi orang- orangnya.”<sup>115</sup>

Pimpinan Masyumi menilai pembubaran ini merupakan suatu tindakan pemerkosaan dan bertentangan dengan rasa keadilan. Akan tetapi Masyumi menyampaikan bahwa meskipun sudah dinyatakan bubar, mereka akan tetap memperjuangkan hak- haknya, seperti mengajukan tuntutan kepada pengadilan negeri istimewa Jakarta untuk membatalkan tindakan pemerintah yang dianggap melangkahi hukum. Yang akan ditempuh oleh Ketua Umum terakhir Masyumi yaitu Prawoto Mangkusasmito sebagai warga negara, demikianlah sebagian isi dari memorandum pimpinan partai Masyumi yang disampaikan kepada Presiden.

Setelah surat pimpinan Masyumi yang menyatakan bubarnya Masyumi disampaikan kepada Presiden, Pimpinan partai Masyumi juga meneruskan surat kepada para pimpinan wilayah Masyumi di seluruh Indonesia, terkait keputusan yang diambil oleh pimpinan Masyumi yang menyatakan Masyumi resmi bubar.<sup>116</sup>

#### **4.2 Perbandingan Perolehan Suara Partai Islam Pada Pemilu Sebelum Dan Sesudah Masyumi Bubar**

---

<sup>115</sup> Pernyataan Pemerintah dihadapan DPR pada tanggal 28 februari 1958, statement Perdana Menteri Djuanda.

<sup>116</sup> Insan Fahmi Siregar, “sejarah pertumbuhan dan perkembangan partai Masyumi (1945-1960)”, (Depok : Universitas Indonesia, 2013, 166- 168.

Pemilu merupakan instrumen penting pada negara demokrasi yang mana menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai wadah bagi anggota parlemen yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.<sup>117</sup> Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu perdana bangsa Indonesia yang pada saat itu umur Republik Indonesia belum genap 10 tahun.

Gagasan untuk menyelenggarakan pemilu telah ada sejak awal kemerdekaan RI pada tahun 1945. tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mulanya ingin diselenggarakan pada awal tahun 1946, dicantumkan dalam mklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta per tanggal 3 November 1945 yang berisi tentang anjuran pembentukan partai- partai politik.

berikut ini merupakan data hasil pemilihan umum dari tahun 1955- 1999 sebagai pembandingan perolehan suara ketika Masyumi masih ada hingga dibubarkan.<sup>118</sup> Pemilu 1955 diperuntukan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Konstituan, dengan hasil sebagai berikut ini:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>117</sup> Mohammad Nazir Salim, *Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta, 1951*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 4.

<sup>118</sup> Data berasal dari modul KPU

Pemilu legislatif (DPR)

No	Nama Partai	Suara	% Suara	kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22.32	57
2	<b>Masyumi</b>	<b>7.903.886</b>	<b>20.92</b>	<b>57</b>
3	<b>Nahdlatul Ulama (NU)</b>	<b>6.955.141</b>	<b>18.41</b>	<b>45</b>
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16.36	39
5	<b>Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)</b>	<b>1.091.160</b>	<b>2.89</b>	<b>8</b>
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2.66	8
7	Partai Katolik	770.740	2.04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1.99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1.43	4
10	<b><u>Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Pertti)</u></b>	<b><u>483.014</u></b>	<b><u>1.28</u></b>	<b><u>4</u></b>
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0.64	2
12	Partai Buruh	224.167	0.59	2
13	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) (Pemilihan n.d.)	219.985	0.58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0.55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi (P3RI)	200.419	0.53	2
16	Murba	199.588	0.53	2
17	Baperki	178.887	0.47	1

18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0.47	1
19	Grinda	154.792	0.41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0.40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0.39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0.30	1
23	<b><u>Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)</u></b>	<b><u>85.131</u></b>	<b><u>0.23</u></b>	<b><u>1</u></b>
24	<b><u>AKUI (Angkatan Kesatuan Islam)</u></b>	<b><u>81.454</u></b>	<b><u>0.22</u></b>	<b><u>1</u></b>
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0.21	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0.19	1
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0.17	1
28	R.Soedjono Prawirosoedarso	53.306	0.14	1
29	Lain-lain	1.022.433	271	
	JUMLAH	37.785.299	100	257

Perolehan suara untuk dewan Konstituante:

No	Partai	Suara	% Suara	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.079.218	23.97	119
2	<b><u>Masyumi</u></b>	<b><u>7.789.619</u></b>	<b><u>20.59</u></b>	<b><u>112</u></b>
3	<b><u>Nahdlatul Ulama (NU)</u></b>	<b><u>6.989.333</u></b>	<b><u>18.47</u></b>	<b><u>91</u></b>

4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16.47	80
5	<b><u>Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)</u></b>	<b><u>1.059.922</u></b>	<b><u>2.80</u></b>	<b><u>16</u></b>
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2.61	16
7	Partai Katolik	748.591	1.98	10
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1.84	10
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1.44	8
10	<b><u>Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Pertti)</u></b>	<b><u>465.359</u></b>	<b><u>1.23</u></b>	<b><u>7</u></b>
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0.58	3
12	Partai Buruh	332.047	0.88	5
13	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	152.892	0.40	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0.35	2
15	Persatuan Pegawai Polisi (P3RI)	179.346	0.47	3
16	Murba	248.633	0.66	4
17	Baperki	160.456	0.42	2
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0.43	2
19	Grinda	157.976	0.42	2
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0.43	2
21	Persatuan Daya (PD)	169.222	0.45	3
22	PIR Hazairin	101.509	0.27	2
23	<b><u>Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)</u></b>	<b><u>74.913</u></b>	<b><u>0.20</u></b>	<b><u>1</u></b>
24	<b><u>AKUI (Angkatan Kesatuan Islam)</u></b>	<b><u>84.862</u></b>	<b><u>0.22</u></b>	<b><u>1</u></b>
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0.10	1

26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	143.907	0.38	2
27	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	55.844	0.15	1
28	R.Soedjono Prawirosoedarso	38.356	0.10	1
29	Gerakan Pilihan Sunda	25.035	0.09	1
30	Partai Tani Indonesia	30.060	0.08	1
31	Radja Keprabonan	33.660	0.09	1
32	Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI)	39.847	0.11	1
33	PIR NTB	33.823	0.09	1
34	.M.Idrus Effendi	31.988	0.08	1
	Lain lain	426.856	1.13	
JUMLAH		37.837.105		514

**Pemilu 1971**, dilaksanakan pada tanggal 5 juli 1971 untuk memilih anggota DPR, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Partai	Suara	% Suara	Kursi
1	Golkar	34.348.637	62.82	236
2	<b><u>Nahdlatul Ulama (NU)</u></b>	<b><u>10.213.650</u></b>	<b><u>18.68</u></b>	<b><u>58</u></b>
3	<b><u>Parmusi</u></b>	<b><u>2.930.746</u></b>	<b><u>5.36</u></b>	<b><u>24</u></b>
4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6.93	20
5	<b><u>Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)</u></b>	<b><u>1.308.237</u></b>	<b><u>2.39</u></b>	<b><u>10</u></b>
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1.34	7

7	Partai Katolik	603.740	1.10	3
8	<b><u>Pergerakan Tarbiyah Islamiyah</u></b> <b><u>(Perti)</u></b>	<b><u>381.309</u></b>	<b><u>0.69</u></b>	<b><u>2</u></b>
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0.61	
10	Murba	48.126	0.08	
JUMLAH		54.669.509	100.00	360

**Pemilu 1977**, dilaksanakan pada tanggal 2 mei 1977

No	Nama Partai	Suara	% Suara	Kursi
1	Golkar	39.750.096	62.11	232
2	<b><u>PPP</u></b>	<b><u>18.743.491</u></b>	<b><u>29.29</u></b>	<b><u>99</u></b>
3	PDI	5.504.757	8.60	29
JUMLAH		63.998.344	100.00	360

Pemilu pertama kali diselenggarakan Pada September 1955, semenjak indonesia meraih kemerdekaan. diperkirakan 39 juta masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam memilih perwakilan yang akan duduk di Dewan Konstituante. 39 juta tersebut sama dengan 91,5% total peserta yang terdaftar sebagai pemilih.

Artinya dari 100% masyarakat Indonesia yang terdaftar hanya sekitar 8,5% saja yang tidak menggunakan haknya, sisanya sebanyak 91,5%

memberikan suaranya.<sup>119</sup> Melihat besarnya jumlah penduduk yang mencoblos pada pemilu perdana ini, terlihat bahwa antusiasme Masyarakat dalam mengikuti pemilu ini sangatlah besar.

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1955 ini nampaknya tidak menghasilkan kemenangan bagi salah satu aliran besar manapun. Aliran Islam hanya meraih 43,9% dari total suara atau 45,1% dari total kursi di DPR. Dari total 257 kursi di DPR, partai-partai Islam memperoleh 116 kursi. Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PSII 8 kursi, Perti 4 kursi, dan partai-partai Islam sejumlah 2 kursi.<sup>120</sup>

Berdasarkan undang-undang pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun konstituante, sistem yang digunakan ialah proporsional perwakilan berdasarkan daerah pemilihan. Terdapat 15 daerah pemilihan di Indonesia, masing-masing diberi jatah kursi sesuai proporsi jumlah penduduk. Pemilihan dengan sistem proporsional perwakilan terlihat tidak menguntungkan Masyumi yang suaranya hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, mulai dari Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan dan juga Jawa Barat.<sup>121</sup>

Meskipun selisih suara Pemilu legislatif 1955 antara Masyumi dan PNI cukup tinggi, terpaut kurang lebih 500 ribu suara. Masyumi mendapatkan 57 kursi sebagaimana PNI, hal ini dikarenakan, Masyumi unggul di beberapa

---

<sup>120</sup> Latif, Yudi. *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Edisi Digital. (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 453

<sup>121</sup> Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, Penerj. Tony Pasuhuk. (Jakarta: Mizan, 2013), 198-199.

wilayah, sementara PNI unggul di pulau Jawa, terutama Jawa timur dan jawa tengah. Pulau Jawa menjadi kunci kemenangan PNI karena merupakan pulau dengan populasi terpadat di Indonesia.<sup>122</sup>

Jumlah total suara yang berhasil diraih partai Islam yang hanya 43,9% menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk muslim Indonesia mengarahkan pilihannya kepada partai nasionalis dan sekularis. Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum muslim yang mayoritas ini tidak memiliki aspirasi politik yang tunggal, melainkan beraneka ragam. dan jika dilihat dari data yang disajikan, mayoritas justru mempercayakan aspirasinya kepada partai berhaluan nasional.

Diposisi pertama PNI meraih 8.434.653 suara dengan jumlah kursi, sementara, Masyumi mengantongi sekitar 7.903.886 suara dalam pemilihan DPR, menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak kedua dalam pemilu 1955. NU dengan 6.955.141 suara, disusul oleh PKI dengan 6.179.914.<sup>123</sup> Masyumi unggul di Jawa Barat, sementara itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PNI, NU, PKI hampir memiliki kekuatan yang seimbang, pada dua wilayah ini PNI menang sebesar 32%, NU, 30%, dan PKI 27%. Sementara di lain sisi Masyumi hanya meraih suara sebanyak 12% saja.

Jika dibandingkan hasil pemilu 1955 dengan hasil pemilu 1971, terdapat beberapa perbedaan, yakni jumlah partai yang mengerucut menjadi 10 partai saja, Pada masa orde baru tema atau gagasan yang menjadi langkah orde baru adalah menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Serta

---

<sup>122</sup> Berdasarkan pemilu 1955

<sup>123</sup> Lihat hasil Pemilu tahun 1955.

dibubarkannya PKI (Partai Komunis Indonesia) dapat dianggap sebagai kesempatan bagi dilaksanakannya pembaharuan politik dan sistem kepartaian di Indonesia.

Orde baru berupaya membatasi partai politik selain Golkar. Oleh karenanya, penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang mutlak pada masa orde baru. Kebijakan ini tertuang dalam ketetapan MPRS no. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan dan Kekaryaan. Fusi (penyederhanaan) diterjemahkan sebagai gabungan dari berbagai organisasi atau partai politik yang mengikat diri kedalam satu badan, satu pimpinan dan satu pengelolaan Organisasi.

Puncaknya, pemerintah mengesahkan undang-undang no.3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya. UU merupakan bentuk pengesahan terhadap kebijakan penyederhanaan partai politik. Pertama, dalam rangka penyederhanaan kehidupan politik, organisasi yang ada mengelompokkan diri menjadi dua partai politik dan satu Golongan Karya. Kedua, diharapkan fusi partai politik ini dapat menjamin persatuan stabilitas nasional serta meningkatkan percepatan pembangunan.

Munculnya kekuatan baru yang mendominasi, yakni parta Golkar, yang meraih 34.348.673 suara, disusul NU yang mengalami peningkatan dengan 10.213.650 suara. Muncul sebuah partai baru diurutan ketiga, yakni, Parmusi dengan perolehan suara 2.930.746. Parmusi bukanlah partai baru, akan tetapi, Parmusi merupakan wadah baru yang menampung ide, cita-cita dan moral

perjuangan yang sebelumnya sudah ada.<sup>124</sup> Bubarnya partai Masyumi yang dianggap merampas hak- hak warga negara dalam berkumpul dan berserikat menjadi cikal bakal lahirnya Parmusi di masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.<sup>125</sup>

Ditambah dengan perolehan suara PSII dan Perti, maka partai politik Islam mengantongi sekitar 14.833.942 atau sekitar 27.12%. perolehan suara partai Islam pada pemilu 1955 yang berhasil meraih 43,9%. terdapat selisih 16,78% suara jika dibandingkan dengan pemilu 1971, selanjutnya jika dibandingkan antara hasil dari pemilu 1971 dengan 1977, terdapat kenaikan suara dengan selisih 2,17%. Perbedaan yang signifikan sejak Masyumi dibubarkan memicu kemunduran yang dirasakan golongan Islam dalam rangka memperjuangkan aspirasi politiknya di kancah Nasional.

Kebijakan penyederhanaan partai politik oleh orde baru berhasil mengubur mimpi golongan islam sekaligus menghentikan laju pertumbuhan partai berbasis Islam yang sebelumnya sudah terpuruk karena Masyumi yang tersandung kasus pemberontakan PRRI, sejak pemilu 1955 hingga 1977, tidak mampu kembali ke perolehan suara pada pemilu 1955 yang meraih 41,7%. Partai Islam terus mengalami kemerosotan suara secara perlahan, hal ini menandakan bahwa partai Islam mulai pudar pesonanya di mata masyarakat Indonesia pada umumnya.

---

<sup>124</sup> Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1955), 84.

<sup>125</sup> Solichin Salam, *Sejarah Partai Muslimin Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penyelidikan Islam, 1970), 9.

### 4.3 Dinamika Partai Islam Pasca Bubarnya Masyumi

Demokrasi terpimpin Soekarno memang tidak memberi peluang untuk perbedaan pendapat dalam menghadapi isu-isu politik penting. Demokrasi terpimpin ditafsirkan oleh sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip perjuangan dalam islam. Berbeda dengan Masyumi yang secara secara gamblang menentang demokrasi terpimpin.

tiga partai Islam yakni, NU, PSII dan Perti berhasil untuk bertahan hidup selama periode demokrasi terpimpin, bahkan terus hingga masa sesudahnya. Ketiga partai ini mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi terpimpin seperti yang diinginkan oleh Presiden Soekarno. tiga partai ini masih mendukung Soekarno walaupun sudah mulai merenggankan diri dari dari sistem yang berlaku.

Masyumi dan ketiga partai tersebut sama-sama berjuang di dalam Konstituante hingga bubarnya pada tahun 1959.<sup>126</sup> Fraksi Islam dalam Konstituante dipimpin oleh Kyai H. Masjkur dari NU setelah Kasman Singodimedjo yang berasal dari Masyumi ditangkap pada tanggal 5 september 1958.<sup>127</sup> Kia Masjkur bertahan dalam pendiriannya bersama untuk terus mengadakan pertemuan antara sesama partai Islam. Wakil Konstituante pada saat itu ialah Prawoto Mangkusasmito yang berasal dari Masyumi mengupayakan agar semua wakil partai Islam untuk tetap bersatu.

---

<sup>126</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 388-389.

<sup>127</sup> Kasman ditangkap karena pidatonya yang mengancam Soekarno dan pemerintah tentang perkembangan di Indonesia.

Perlu dibedakan antara ideologi dan praktek politik bagi NU, PSII, Perti. Bagi mereka, ideologi dan politik tidaklah harus sesuai, meskipun dalam Konstituante ketiga partai ini gigih membela Islam sebagai ideologi, mereka lebih dinamis dalam praktek politik. Oleh karena itu, janji yang diikrarkan bersama Masyumi, Katolik, Parkindo dan PRI untuk menolak konsepsi Soekarno mulai luntur lantaran ketiga partai ini bersedia duduk di dalam kabinet Djuanda pada tahun 1957.<sup>128</sup>

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan keppres no.200 yang memaksa Masyumi untuk bubar. Hal ini terjadi karena dianggap kontra revolusi yang menurut Soekarno merupakan revolusi yang belum selesai. Selain itu Soekarno juga menuduh Masyumi berada di belakang layar pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah yang merupakan wilayah basis masa Masyumi. Ditambah lagi tidak mengeluarkan sikap yang konkrit terhadap keterlibatannya. Masyumi merupakan duri di dalam daging yang mengganggu “jalannya revolusi” dan harus dibubarkan.<sup>129</sup>

Lewat Keppres no.200 tahun 1960, Soekarno melancarkan serangan terakhir untuk membungkam tokoh-tokoh Masyumi, seperti, Mohammad Natsir, Hamka, Boerhanoeddin Harahap, Muhammad Yunan Nasution, Prawoto Mangkusasmito, Isa Ansari dan yang lainnya harus mendekam di

---

<sup>128</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, 391

<sup>129</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, 75.

dalam penjara tanpa proses hukum yang wajar akibat perlawanannya terhadap kebijakan yang diambil Soekarno.<sup>130</sup>

Soekarno lengser setelah menandatangani surat pada tanggal 11 maret atau yang biasa disebut sebagai Supersemar, Masa orde baru dimulai pada tahun 1966 dimana presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, orde baru ditandai dengan keikutsertaan ABRI dalam pemilihan umum dengan bergabung dengan Golkar, dikarenakan situasi nasional yang belum stabil, pemilu baru bisa lagi diadakan pada tahun 1971.

Di masa ini, tokoh- tokoh eks Masyumi yang sebelumnya menjadi tahanan politik dibebaskan oleh Soeharto. Order baru menjadi lampu hijau bagi tokoh-tokoh mantan Masyumi dan mulailah tercetus gagasan untuk rehabilitasi Masyumi dengan mendirikan Badan Koordinasi Amal Muslimin yang pada akhirnya melahirkan sebuah partai politik bernama Parmusi pada tahun 1968.<sup>131</sup> Banyak yang beranggapan bahwa pembubaran Masyumi merupakan campur tangan PKI, sementara pemberontakan G-30S yang telah dilakukan PKI berhasil dipadamkan hingga PKI pun resmi dibubarkan.

Maka tidak mengherankan jika sebagian umat islam menginginkan isu rehabilitasi Masyumi adalah keharusan. Akan tetapi pemerintah melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda, pemerintah khawatir dengan sikap oposan Masyumi serta sepak terjang Masyumi yang mahir dalam berpolitik. Akhirnya pemerintah menolak hasil muktamar pertama yang diselenggarakan di malang

---

<sup>130</sup>Adi Warsito, *Perubahan Partai Muslimin Indonesia, Dari Partai Ke Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 1968-1999*, 26.

<sup>131</sup>Adi Warsito, *Perubahan Partai Muslimin Indonesia, Dari Partai Ke Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 1968-1999*, 27.

pada tanggal 23 juli 1967 dengan Mohammad Roem yang merupakan eks Masyumi sebagai ketua Parmusi. Setelah jabatan ketua diganti oleh Djarnawi Hadikusumo yang berasal dari Muhammadiyah, barulah pemerintah merestui.<sup>132</sup>

Konsep penyederhanaan partai (Fusi) sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan dikukuhkan melalui UUD No.3 tahun 1975. Pada kenyataannya partai-partai Islam masih belum mampu untuk meraih pencapaian yang memuaskan seperti Masyumi di masa orde lama. Oleh karenanya, kebijakan fusi diharapkan mampu menjadi wadah bersatunya umat Islam dalam mewujudkan cita-cita umat Islam di dalam wadah baru yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akan tetapi, dalam perjalanannya, PPP mengalami masalah yang sama sebagaimana Masyumi, terjadi konflik internal maupun eksternal. Kebijakan fusi jelas menguntungkan bagi Golkar dan merugikan bagi partai Islam dan partai Nasional. Partai yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII dan Perti ini terlihat dari perolehan suaranya.

Ciri khas sistem politik ala orde baru ialah konsep masa mengambang atau *Floating Mass*. Menurut Mawardi Rauf yang sependapat dengan Rudini menyatakan bahwa kebijakan politik rezim orde baru merupakan upaya depolarisasi dan pembentukan massa mengambang atau floating mass. Akibatnya, fungsi dan peranan partai politik kian melemah.

---

<sup>132</sup> Adi Warsito, *Perubahan Partai Muslimin Indonesia, Dari Partai Ke Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 1968-1999*, 2.

Partai politik tidak diperbolehkan membentuk kepengurusan di kecamatan dan desa. Dengan begitu partai politik tidak dapat melakukan kegiatan politik di pedesaan. PPP semakin kesulitan mengembangkan pengaruhnya dalam lapisan masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Masyumi merupakan partai politik yang dibentuk pada tanggal 7 november 1945, Masyumi adalah wadah politik bagi berbagai macam golongan islam, pada masa setelah kemerdekaan, Masyumi aktif mengawal pemerintahan supaya berjalan sesuai dengan asas keadilan dan demokrasi, Masyumi mengusulkan Islam sebagai dasar negara, akan tetapi perjuangan dalam mewujudkan gagasan itu cukup sulit dikarenakan dalam Konstituante, tidak sedikit yang meragukan islam sebagai dasar negara dan pancasila merupakan pilihan yang paling rasional bagi Indonesia.

Indonesia memasuki babak baru yakni demokrasi terpimpin, pada masa ini, posisi soekarno sangatlah kuat, Soekarno memandang bahwa sistem multi partai merupakan penyebab utama yang membuat situasi Indonesia tidak kondusif. Posisi Masyumi sebagai partai politik dan oposisi dari gagasan Soekarno pun mulai terpojok, ditambah lagi hengkangnya PSII dan NU dari Masyumi membuat Masyumi semakin lemah kekuatannya. Hingga puncaknya tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI menjadi pukulan telak yang mengakibatkan Masyumi harus membubarkan diri.

Sejak Masyumi bubar, perolehan suara partai islam mengalami penurunan yang signifikan, tidak bisa mengulangi pencapaian perolehan suara

sebesar 43,9% sebagaimana di tahun 1955. Pada pemilu 1971 dan 1977, perolehan suara yang diraih yakni 27.12%. dan 29,29% suara. terlihat selisih suara sekitar 16-18% jika dibandingkan dengan Pemilu 1955 dimana Masyumi masih berdiri. Dapat disimpulkan bahwa 16-18% suara tersebut beralih kepada partai lain, mulai dari partai berhaluan Nasional, Golkar, atau bahkan memilih untuk abstain (Golput). Dengan data yang sudah terkumpul, peneliti berkesimpulan bahwa bubarnya Masyumi memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan politik golongan Islam.

## **5.2 Kritik dan Saran**

Penulis sadar, dalam penulisan karya ini tentu terdapat banyak kekurangan data serta keterbatasan kemampuan penulis dalam menghimpun juga menjabarkan penjelasan Dengan segala keterbatasan serta kekurangan dalam pengolahan sumber data mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, semoga kita dimasa yang akan datang dapat terus mempelajari dan mencintai sejarah. Karena Sejarah adalah cermin masa lalu, yang membantu kita memahami masa sekarang serta mempersiapkan masa depan. Penulis memandang penting mempelajari sejarah partai politik islam di Indonesia.

Penulis fokus terhadap kajian sejarah-politik Indonesia pada masa rentang tahun 1945-1999. semoga dengan hadirnya karya ini dapat menyumbang sedikit khazanah pengetahuan sejarah khususnya pada lingkup sejarah sejarah-politik Indonesia di tahun 1945-1999. Kepada Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan

Ampel Surabaya semoga dapat memperkaya kajian-kajian literatur sejarah, sosial, serta politik yang diharap bermanfaat bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Semoga karya ini bisa menjadi tulang punggung penulisan sejarah yang berkaitan dengan sejarah politik Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Daftar Pustaka

- Abdulah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1987.
- Abdurahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2011.
- Andre, Felliard. *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: Lkis. 1999.
- Andrey, R. Kahin & George. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Grafiti. 1997.
- Anwar, Harjono. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1955.
- Anwar, Harjono. *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Anwar, Idwar. *Tulang Punggung Dipungungi: Pecah Kongsi NU-Masyumi Jelang Pemilu 1955*. Al-Qalam Vol.26.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Drooglever A.B & Lopian. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Grafiti. 1992.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina. 1998.
- Faisal, Ismail. *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 2002.
- Greg, Fealy. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952- 1967*. Yogyakarta: Lkis. 2003.

- Kahin, George McTuman, *Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia*, Solo: UNS Press, 1955.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Kepartaian di Indonesia*. Jakarta. 1951.
- Komisi Pemilihan Umum. *Hasil Pemilu 1955-2009*.
- Kuswanto. *Konstitusionalitas, Penyederhanaan Partai Politik: Peraturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press. 2016.
- Leirissa, R.Z. *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti. 1997.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Agama Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press. 1988.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gemas Insani. 1998.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'ati al-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Ma'shum, Saifullah. *K.H Abdul Wahab Chasbullah: Perintis, Pendiri dan Penggerak NU*. Jakarta: Panitia Penulisan Buku Sejarah Perjuangan K.H Abdul Wahab Chasbullah. 1999.
- Madinier, Rémy. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*.

- editor: Tony Pasuhuk. Jakarta: Mizan. 2013.
- Natsir, Mohammad. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante. 1957
- Natsir, Mohammad. *Capita Selecta Djilid III*. Jakarta: Dewan Dakwah Lembaga Islamiyah, 1957.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press. 1987
- Poesponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993
- Qulub, Muhammad Syifaul. *Partai-Partai Politik Islam 1945-1959*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2013.
- R. Yusran. *Dasar Negara Islam dan Pancasila*. Jakarta: Panjimas. 2001.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Silverio R.L. Aji Sampurno S. *Latar Belakang Keluarnya Keppres no. 20 0 Tahun 1960: Sekitar Pembubaran Partai Masyumi*. Yogyakarta: sejarah fakultas sastra. universitas sanata dharma. 1994.
- Salam, Solichin. *Sejarah Partai Muslimin Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Islam. 1970.
- Salim, Mohammad Nazir. *Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta, 1951*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
- Samsuri. *Politik Islam Anti Komunis*. Yogyakarta: PT Safira Press. 2004.
- Setjen DPR RI. *Risalah Perundingan*. Konstituante RI. 1957.
- Siregar, Insan Fahmi. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)." Depok: Universitas Indonesia. 2003.

- Sjamsudin, Nazaruddin. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1989
- Sjamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2007.
- Soekarno. *di Bawah Bendera Revolusi jilid II*. Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi Jilid II. 1976.
- Soekarno. *Islam, Nasionalisme, Marxisme*. Yogyakarta: Pustaka Kendi. 2000.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES. 1988
- Surahman, Nanang. "Pancasila Vs Islam : Konflik Tentang Dasar Negara Antara PKI- Masyumi di Majelis Konstituante 1956 - 1959". Depok: Universitas Indonesia. 2002.
- Suseno, Franz Magnis. *di Seberang Jembatan Emas*. Kompas, edisi khusus 100 tahun Soekarno.
- Syaekhu, Ahmad. 2021. "Prawoto Mangkusasmito dan Bubarnya Partai Politik Masyumi". IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2021.
- Syamsuddin, Alfian & Nazaruddin. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Putaka Utama Grafiti. 1991.
- Syamsudin, Nazaruddin. 1993. *Soekarno, Pemikiran Dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thaba. *Islam dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press. 1992.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Thantowi, Pramono U. *Perjalanan Politik Muhammadiyah Dari Ahmad Dahlan Hingga Syafi'i Ma'arif*. Jakarta: Tanwir. 2003.

- Warsito, Adi, *Perubahan Partai Muslimin Indonesia, Dari Partai Ke Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 1968-1999*, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2020 .
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Jilid I*. Jakarta: Prapanca. 1959.
- Yamin, Muhammad. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Prapanca. 1959.
- Yudi, Latif. *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Edisi Digital, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi. 2012
- Zuhri, Saifuddin. *K.H. Abdulwahab Chasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Yamunu. 1972.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A